



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1185, 2017

KEMENKEU. Penilaian Kembali BMN. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 118/PMK.06/2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
3. Inventarisasi adalah kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara.
4. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.

5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara.
6. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
7. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah unit akuntansi Barang Milik Negara pada tingkat Satuan Kerja/KPB yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan Barang Milik Negara.
8. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPB-W adalah unit akuntansi Barang Milik Negara pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan laporan Barang Milik Negara dari UAKPB.
9. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 yang selanjutnya disingkat UAPPB-E1 adalah unit akuntansi Barang Milik Negara pada tingkat eselon 1 yang melakukan kegiatan penggabungan laporan Barang Milik Negara dari UAPPB-W dan UAKPB yang langsung berada dibawahnya.
10. Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Penilai Direktorat Jenderal adalah Penilai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal yang diangkat oleh kuasa Menteri Keuangan serta diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen.
11. Penilaian Kembali adalah proses revaluasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai Standar Penilaian.
12. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara pada saat tertentu.

13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara dengan tidak mengubah status kepemilikan.
14. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
15. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
16. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain Pengguna Barang yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
17. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah Unit Eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang, dan lelang.
18. Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah salah satu pejabat unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang, dan lelang.
19. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kanwil DJKN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
20. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil DJKN.

21. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
22. Sistem Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Negara adalah subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber guna menghasilkan informasi untuk penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara/SIMAK BMN).

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur pelaksanaan Penilaian Kembali BMN berupa Aset Tetap.
- (2) Penilaian Kembali BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan data awal;
 - b. Inventarisasi;
 - c. Penilaian;
 - d. penyusunan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian;
 - e. tindak lanjut hasil Inventarisasi dan Penilaian;
 - f. monitoring dan evaluasi; dan
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali.

Bagian Ketiga
Objek Penilaian Kembali

Pasal 3

- (1) Objek Penilaian Kembali BMN berupa Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Jalan, Irigasi dan Jaringan,
pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.
- (2) Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Jalan dan Jembatan; dan
 - b. Bangunan Air.
- (3) Selain Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilaian Kembali BMN dilaksanakan terhadap Aset Tetap tersebut pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Pengelola Barang

Pasal 4

- (1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dalam pelaksanaan Penilaian Kembali berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - a. merumuskan kebijakan dan strategi Penilaian Kembali BMN;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN;
 - c. melaksanakan Penilaian BMN;

- d. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Penilaian Kembali BMN; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN kepada Presiden.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
 - (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat struktural di lingkungan DJKN untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada tingkat nasional dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Tingkat Pusat.
- (2) Tim Koordinasi Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. menyiapkan usulan kebijakan dan pedoman serta langkah pelaksanaan Penilaian Kembali BMN;
 - b. menetapkan target penyelesaian Penilaian Kembali BMN secara nasional;
 - c. melakukan koordinasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga, Kanwil DJKN, dan KPKNL dalam perencanaan dan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN;
 - d. melakukan sosialisasi Penilaian Kembali BMN kepada Pengguna Barang, Kanwil DJKN, dan KPKNL;
 - e. melakukan pembinaan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN kepada Pengguna Barang, Kanwil DJKN, dan KPKNL;
 - f. melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada Pengguna Barang, Kanwil DJKN, dan KPKNL;
 - g. menyusun konsep laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN secara nasional dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan; dan
 - h. tugas lain yang diperintahkan oleh Menteri Keuangan.

- (3) Struktur dan susunan keanggotaan serta tanggung jawab Tim Koordinasi Tingkat Pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada tingkat daerah dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Tingkat Daerah sesuai dengan wilayah kerja Kanwil DJKN.
- (2) Tim Koordinasi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Penilaian Kembali BMN di wilayah kerja Kanwil DJKN yang bersangkutan sesuai dengan target penyelesaian Penilaian Kembali BMN secara nasional;
 - b. melaksanakan sosialisasi;
 - c. melakukan pembinaan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN di wilayah kerja Kanwil DJKN yang bersangkutan;
 - d. mengoordinasikan pembentukan Tim Pelaksana pada KPKNL dengan memperhatikan rencana kerja dan beban kerja di wilayah kerja Kanwil DJKN yang bersangkutan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN di wilayah kerja Kanwil DJKN yang bersangkutan;
 - f. melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Penilaian Kembali BMN di wilayah kerja Kanwil DJKN yang bersangkutan; dan
 - g. menyusun konsep laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN di wilayah kerja Kanwil DJKN yang bersangkutan untuk disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN.
- (3) Struktur dan susunan keanggotaan serta tanggung jawab Tim Koordinasi Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan oleh KPKNL dan KPB.
- (2) Kepala KPKNL berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - a. menyusun rencana kerja Penilaian Kembali BMN di wilayah kerja KPKNL yang bersangkutan;
 - b. melaksanakan sosialisasi Penilaian Kembali BMN kepada KPB di wilayah kerjanya;
 - c. membentuk Tim Pelaksana;
 - d. melakukan Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali dengan KPB;
 - e. melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Penilaian Kembali BMN di wilayah kerjanya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN di wilayah kerja KPKNL yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengguna Barang dan KPB

Pasal 8

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - a. melakukan sosialisasi pelaksanaan Penilaian Kembali BMN hingga jenjang KPB dalam lingkup Pengguna Barang yang bersangkutan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi BMN pada lingkup Pengguna Barang yang bersangkutan;
 - c. menyiapkan data awal dan dokumen yang diperlukan untuk Inventarisasi dan Penilaian BMN yang menjadi tanggung jawab Pengguna Barang;
 - d. melaksanakan Inventarisasi BMN;
 - e. melaksanakan tindak lanjut hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada lingkup Pengguna Barang yang bersangkutan; dan

- g. menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat eselon I yang membidangi pengelolaan BMN, seperti Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama/Jaksa Agung Muda Pembinaan/Kepala Badan Sarana Pertahanan/Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana/Pimpinan Kesekretariatan/Kepala Badan Urusan Administrasi/Deputi Bidang Administrasi/Direktur Utama.

Pasal 9

KPB berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- a. menyiapkan data awal dan dokumen yang diperlukan untuk Penilaian Kembali BMN yang menjadi tanggung jawab KPB;
- b. melakukan Inventarisasi BMN yang berada pada penguasaannya;
- c. melakukan koreksi data dan nilai BMN melalui Sistem Aplikasi Penatausahaan BMN berdasarkan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN;
- d. melakukan Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN dengan KPKNL;
- e. melakukan tindak lanjut hasil Inventarisasi BMN; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang secara berjenjang.

BAB III
PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BMN

Bagian Kesatu
Tim Pelaksana

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN melaksanakan Inventarisasi dan Penilaian BMN.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur KPB dan unsur Pengelola Barang.
- (3) Tim Pelaksana yang berasal dari unsur Pengelola Barang terdiri atas:
 - a. Penilai Direktorat Jenderal; dan
 - b. pegawai pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara pada KPKNL dan/atau pegawai pada Seksi lain/Sub Bagian pada KPKNL.
- (4) Dalam hal diperlukan, Kepala KPKNL dapat meminta bantuan tenaga dari Kanwil DJKN/Kantor Pusat DJKN untuk menjadi bagian dari anggota Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim Pelaksana bertanggung jawab untuk:
 - a. menyusun laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN;
 - b. menyampaikan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN kepada Kepala KPKNL; dan
 - c. melakukan *monitoring* atas pelaksanaan:
 1. koreksi data dan nilai BMN hasil Inventarisasi dan Penilaian; dan
 2. Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN antara KPB dengan KPKNL.
- (6) Tim Pelaksana yang berasal dari unsur KPB bertanggung jawab untuk:
 - a. melakukan pencocokan data awal BMN yang akan dilakukan Inventarisasi dan Penilaian BMN;
 - b. melakukan Inventarisasi; dan
 - c. menyusun laporan hasil Inventarisasi.

- (7) Tim Pelaksana yang berasal dari unsur Pengelola Barang bertanggung jawab untuk:
 - a. melakukan pencocokan dan klarifikasi data awal BMN yang akan dilakukan Inventarisasi dan Penilaian BMN;
 - b. mengumpulkan data terkait kebutuhan pengelolaan dan penilaian BMN;
 - c. melakukan Penilaian BMN; dan
 - d. menyusun laporan hasil Penilaian.
- (8) Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN dibentuk oleh Kepala KPKNL.

Bagian Kedua
Penyediaan Data Awal

Pasal 11

- (1) Dalam Penilaian Kembali BMN, UAKPB menyediakan data awal BMN yang terdiri atas:
 - a. data BMN yang menjadi objek Penilaian Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berasal dari Sistem Aplikasi Penatausahaan BMN pada masing-masing Pengguna Barang/KPB;
 - b. profil KPB;
 - c. formulir pendataan objek Penilaian Kembali; dan
 - d. dokumen lain terkait BMN yang diperlukan.
- (2) Data awal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. kode barang;
 - b. nama barang;
 - c. nomor urut pendaftaran;
 - d. tanggal perolehan;
 - e. kuantitas;
 - f. harga perolehan;
 - g. akumulasi penyusutan; dan
 - h. nilai buku.

- (3) Data awal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Daftar Barang Kuasa Pengguna;
 - b. buku barang;
 - c. Kartu Identitas Barang;
 - d. Laporan Barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan;
 - e. dokumen kepemilikan BMN;
 - f. dokumen pengelolaan dan penatausahaan BMN; dan
 - g. dokumen lainnya yang diperlukan.
- (4) Data awal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPKNL sebelum pelaksanaan Penilaian.
- (5) Penyediaan data awal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Inventarisasi

Pasal 12

- (1) Inventarisasi dilakukan berdasarkan Kertas Kerja Inventarisasi.
- (2) Pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pelaksana dari unsur KPB.
- (3) Hasil pelaksanaan Inventarisasi dituangkan dalam laporan hasil Inventarisasi.
- (4) Laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. rekapitulasi hasil Inventarisasi;
 - b. daftar barang hasil Inventarisasi barang baik;
 - c. daftar barang hasil Inventarisasi barang rusak ringan;
 - d. daftar barang hasil Inventarisasi barang rusak berat;
 - e. daftar barang hasil Inventarisasi barang berlebih;
 - f. daftar barang hasil Inventarisasi barang tidak ditemukan;

- g. daftar barang hasil Inventarisasi barang dalam sengketa;
 - h. catatan atas hasil Inventarisasi; dan
 - i. surat keterangan dari KPB/pejabat yang ditunjuk mengenai kebenaran hasil pelaksanaan Inventarisasi.
- (5) Pelaksanaan Inventarisasi serta penyusunan format kertas kerja Inventarisasi dan laporan hasil Inventarisasi dilakukan sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Penilaian

Pasal 13

- (1) Penilaian BMN dilakukan dengan menggunakan:
- a. pendekatan data pasar;
 - b. pendekatan biaya; dan/atau
 - c. pendekatan pendapatan.
- (2) Penggunaan pendekatan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian Penilaian.
- (3) Berdasarkan pertimbangan dalam penggunaan pendekatan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penilaian dilakukan dengan:
- a. survei lapangan, untuk objek Penilaian Kembali berupa Tanah; dan
 - b. tanpa survei lapangan, untuk objek Penilaian Kembali selain Tanah.

Pasal 14

Pelaksanaan Penilaian BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penilaian BMN.

Pasal 15

Penilaian tidak dilakukan terhadap:

- a. BMN yang telah mendapat persetujuan penghapusan atau pemindahtanganan dari Pengelola Barang/Pengguna Barang; dan
- b. BMN yang secara fisik tidak ditemukan berdasarkan laporan hasil Inventarisasi.

Pasal 16

- (1) Hasil Penilaian BMN untuk Penilaian Kembali dituangkan dalam laporan hasil Penilaian.
- (2) Laporan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Penyusunan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil Inventarisasi BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan hasil Penilaian BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Tim Pelaksana menyusun laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN.
- (2) Laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN pada KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4); dan
 - b. laporan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (3) Tim Pelaksana menyelesaikan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN pada KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (hari) kerja setelah tanggal terakhir pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN.
- (4) Penyusunan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN dilakukan sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Tindak Lanjut

Pasal 18

- (1) Tindak lanjut atas hasil Penilaian Kembali BMN terdiri atas:
 - a. penyelesaian BMN berlebih;
 - b. penyelesaian BMN yang tidak ditemukan;
 - c. penyelesaian BMN dalam sengketa;
 - d. penyelesaian BMN yang dikuasai/dimanfaatkan oleh pihak lain sebelum mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang;
 - e. penyelesaian BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/KPB; dan
 - f. koreksi data dan nilai BMN pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Bagian Kedua
Koreksi Data dan Nilai BMN

Pasal 19

- (1) Koreksi data dan nilai BMN pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f dilakukan KPB melalui Sistem Aplikasi Penatausahaan BMN berdasarkan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian.

- (2) Koreksi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan kondisi dan luas.
- (3) Koreksi nilai BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap nilai perolehan dan nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap.
- (4) Nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap yang telah dilakukan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi nol.
- (5) Nilai BMN hasil Penilaian Kembali menjadi nilai perolehan baru.
- (6) Dalam hal nilai BMN hasil Penilaian Kembali lebih tinggi dari nilai buku BMN sebelum koreksi maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan.
- (7) Dalam hal nilai BMN hasil Penilaian Kembali lebih rendah dari nilai buku BMN sebelum koreksi maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- (8) Koreksi nilai hasil penilaian BMN tidak mengakibatkan perubahan penyajian kelompok BMN yang semula sebagai intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
- (9) Koreksi data dan nilai BMN dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penyelesaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (10) Koreksi data dan nilai BMN dilakukan dalam periode pelaporan keuangan semesteran yang sama dengan penyelesaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian.
- (11) Koreksi data dan nilai BMN dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan pada Pemerintah Pusat.

Pasal 20

Koreksi data dan nilai BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi dasar koreksi data dan nilai BMN dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga Rekonsiliasi

Pasal 21

- (1) Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN dilakukan antara KPB dan KPKNL.
- (2) Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyelesaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (3) Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum pelaksanaan Rekonsiliasi data BMN semesteran atau tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Rekonsiliasi BMN.
- (4) Pelaksanaan Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN yang ditandatangani oleh KPKNL dengan KPB.
- (5) Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN dilakukan sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Penyusutan dan Sisa Masa Manfaat

Pasal 22

- (1) Nilai BMN hasil Penilaian Kembali dilakukan penyusutan selama sisa masa manfaat dari BMN yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal BMN hasil Penilaian sudah tidak memiliki sisa masa manfaat pada saat pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian, maka ditentukan masa manfaat baru atas BMN yang bersangkutan oleh Tim Pelaksana.

- (3) Penentuan masa manfaat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan pedoman tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN paling sedikit meliputi:
 - a. capaian target;
 - b. kendala yang dihadapi; dan
 - c. usulan rekomendasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh:
 - a. KPKNL atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada KPB di wilayah kerjanya;
 - b. Kanwil DJKN atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada KPKNL di wilayah kerjanya;
 - c. Tim Koordinasi Tingkat Pusat atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada Pengguna Barang, Kanwil DJKN; dan
 - d. Pengguna Barang atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada KPB.

BAB VI

PELAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BMN

Pasal 24

- (1) Pengguna Barang melakukan pelaporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN secara berjenjang.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. UAKPB;
 - b. UAPPB-W;
 - c. UAPPB-E1; dan
 - d. UAPB.

Pasal 25

- (1) UAKPB menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN berdasarkan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) UAKPB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. UAPPB-W atau UAPPB-E1; dan
 - b. KPKNL.
- (3) Penyampaian laporan pelaksanaan Penilaian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

Pasal 26

- (1) UAPPB-W menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat Wilayah yang merupakan rekapitulasi laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) UAPPB-W wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN kepada:
 - a. UAPPB-E1 atau UAPB; dan
 - b. Kanwil DJKN.
- (3) Laporan pelaksanaan Penilaian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) UAPPB-E1 menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tingkat Eselon I yang merupakan rekapitulasi laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada UAPPB-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Laporan pelaksanaan Penilaian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengguna

Barang setiap bulan, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Pengguna Barang menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat Pengguna Barang yang merupakan rekapitulasi laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada UAPPB-E1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Laporan pelaksanaan Penilaian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola Barang setiap semester, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Kepala KPKNL menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN berdasarkan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Laporan pelaksanaan Penilaian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN setiap bulan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Tim Koordinasi Tingkat Daerah menyusun konsep laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat Kanwil DJKN yang merupakan rekapitulasi laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat KPKNL untuk disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN guna ditetapkan.
- (2) Kepala Kanwil DJKN menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat Kanwil DJKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal setiap bulan, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Tim Koordinasi Tingkat Pusat menyusun konsep laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat nasional yang merupakan rekapitulasi laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat Kanwil DJKN untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal guna ditetapkan.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat nasional kepada Menteri Keuangan setiap triwulan, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Pasal 32

Dalam hal pelaksanaan Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian terhadap seluruh objek Penilaian Kembali BMN yang berada di UAKPB telah dilaksanakan, UAKPB tidak lagi mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

Pasal 33

Penyusunan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada:

- a. tingkat KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- b. tingkat Kanwil DJKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
- c. tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
- d. tingkat Koordinator Wilayah Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- e. tingkat Eselon I Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan
- f. tingkat Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,

dilakukan sesuai dengan format dan tata cara tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Penilaian Kembali BMN dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2018.

Pasal 35

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 36

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN yang berada di luar negeri diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMP. KPU. KAB/KOTA

NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK
CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA.....
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN

PARTAI POLITIK :
PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
DAERAH PEMILIHAN :
KURSI :

| ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA YANG BERHENTI | | | | CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | | | | KETERANGAN |
|---|-------|----------------|-----------------|---|-------------------------------------|-------------|---------------------|---|
| NO URUT DCT | NAMA | SUARA CALON *) | PERINGKAT SUARA | NO URUT DCT | NAMA | SUARA CALON | PERINGKAT SUARA SAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | 5 | DAPIL (Pengganti) *) | | | Ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Pasal Peraturan KPU Nomor Tahun bahwa pengganti peringkat suara sah Nomor (.....) adalah peringkat suara sah berikutnya Nomor (.....) |
| | | | | 1 | | | | |
| | | | | 2 | | | | |
| | | | | 3 | | | | |
| | | | | 6 | | | | |
| | | | | 7 | | | | |

Keterangan *) Pengganti adalah nama calon pengganti antarwaktu yang memenuhi syarat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM REPUBLIK INDONESIA,

(.....)

ARIEF BUDIMAN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118/PMK.06/2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN
KEMBALI BARANG MILIK NEGARA

PENYEDIAAN DATA AWAL BARANG MILIK NEGARA

Penyediaan data awal sebelum pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian meliputi:

(1) Data Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Negara

Data aplikasi Penatausahaan merupakan data Barang Milik Negara (BMN) yang ada di aplikasi Penatausahaan BMN pada posisi terakhir sebelum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian. Data tersebut dilakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa data dalam aplikasi Penatausahaan BMN tersebut adalah data yang valid sebagai data pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

Verifikasi dan validasi data aplikasi Penatausahaan BMN satuan kerja dilakukan untuk mengetahui bahwa hanya aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, dan bangunan air yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015 yang menjadi objek Penilaian Kembali BMN.

Data verifikasi dan validasi data objek Penilaian Kembali BMN menjadi target satuan kerja untuk selanjutnya menjadi bahan penyusunan rencana kerja pelaksanaan Penilaian Kembali.

(2) Profil UAKPB/Satuan Kerja

Profil UAKPB/satuan kerja meliputi identitas satuan kerja, unit Pengelola Barang yang membina satuan kerja, jumlah personil yang ada, dan identitas penanggung jawab satuan kerja, sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran ini.

(3) Formulir pendataan objek Penilaian Kembali

Formulir pendataan objek Penilaian Kembali terdiri atas 9 (sembilan) formulir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini. Formulir pendataan objek Penilaian Kembali disiapkan sebelum pelaksanaan Inventarisasi.

(4) Dokumen lain terkait BMN yang diperlukan

Dokumen lain terkait BMN yang diperlukan pada saat pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian, meliputi:

- a. Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
- b. Buku Barang;
- c. Kartu Identitas Barang (KIB);
- d. Daftar Barang Lainnya (DBL);
- e. Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Semesteran dan Tahunan;
- f. Salinan dokumen kepemilikan BMN;
- g. Salinan dokumen pengelolaan dan Penatausahaan BMN; dan
- h. dokumen lainnya yang diperlukan.

FORMAT PROFIL UAKPB/SATUAN KERJA

| PROFIL UAKPB / SATUAN KERJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---------|--------------|---|----------------------------|--------------|---|----------------------------------|--------------|---|------------------------------|--------------|---|------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--------------|---|---|--------------|---|--------------------------------|--------------|---|--|--------------|----|-------------------------------|--------------|----|----------------------------|--------------|----|-----------------------------|--------------|----|--------------------|--------------|--|
| 1 | Nama K/L | : ... (1) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Nama UAKPB/Satker | : ... (2) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Kode UAKPB/Satker | : ... (3) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Jenis UAKPB/Satker (4) | : <input type="checkbox"/> Satker Non Pelayanan <input type="checkbox"/> Satker Pelayanan pengunjung/hari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Alamat UAKPB/Satker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Jalan | : ... (5) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Kelurahan | : ... (6) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Kecamatan | : ... (7) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. Kabupaten/Kota | : ... (8) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e. Provinsi | : ... (9) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Wilayah Kerja DJKN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Kantor Wilayah DJKN | : ... (10) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. KPKNL | : ... (11) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Identitas KPB/Kepala Satker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Nama | : ... (12) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. NIP | : ... (13) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Jabatan | : ... (14) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Struktur Organisasi Satker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 75%;">Jabatan</th> <th style="width: 20%;">Jumlah orang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Menteri dan yang setingkat</td><td>... (15) ...</td></tr> <tr><td>2</td><td>Wakil Menteri dan yang setingkat</td><td>... (15) ...</td></tr> <tr><td>3</td><td>Eselon IA dan yang setingkat</td><td>... (15) ...</td></tr> <tr><td>4</td><td>Eselon IB dan yang setingkat</td><td>... (15) ...</td></tr> <tr><td>5</td><td>Eselon IIA dan yang setingkat</td><td>... (15) ...</td></tr> <tr><td>6</td><td>Eselon IIB dan yang setingkat</td><td>... (15) ...</td></tr> <tr><td>7</td><td>Eselon III sebagai kepala kantor dan yang setingkat</td><td>... (15) ...</td></tr> <tr><td>8</td><td>Eselon III bukan kepala kantor</td><td>... (15) ...</td></tr> <tr><td>9</td><td>Eselon IV sebagai kepala kantor dan yang setingkat</td><td>... (15) ...</td></tr> <tr><td>10</td><td>Eselon IV bukan kepala kantor</td><td>... (15) ...</td></tr> <tr><td>11</td><td>Pejabat Fungsional Gol. IV</td><td>... (15) ...</td></tr> <tr><td>12</td><td>Pejabat Fungsional Gol. III</td><td>... (15) ...</td></tr> <tr><td>13</td><td>Eselon V/Pelaksana</td><td>... (15) ...</td></tr> </tbody> </table> | No. | Jabatan | Jumlah orang | 1 | Menteri dan yang setingkat | ... (15) ... | 2 | Wakil Menteri dan yang setingkat | ... (15) ... | 3 | Eselon IA dan yang setingkat | ... (15) ... | 4 | Eselon IB dan yang setingkat | ... (15) ... | 5 | Eselon IIA dan yang setingkat | ... (15) ... | 6 | Eselon IIB dan yang setingkat | ... (15) ... | 7 | Eselon III sebagai kepala kantor dan yang setingkat | ... (15) ... | 8 | Eselon III bukan kepala kantor | ... (15) ... | 9 | Eselon IV sebagai kepala kantor dan yang setingkat | ... (15) ... | 10 | Eselon IV bukan kepala kantor | ... (15) ... | 11 | Pejabat Fungsional Gol. IV | ... (15) ... | 12 | Pejabat Fungsional Gol. III | ... (15) ... | 13 | Eselon V/Pelaksana | ... (15) ... | |
| No. | Jabatan | Jumlah orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Menteri dan yang setingkat | ... (15) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wakil Menteri dan yang setingkat | ... (15) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Eselon IA dan yang setingkat | ... (15) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Eselon IB dan yang setingkat | ... (15) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Eselon IIA dan yang setingkat | ... (15) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Eselon IIB dan yang setingkat | ... (15) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Eselon III sebagai kepala kantor dan yang setingkat | ... (15) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Eselon III bukan kepala kantor | ... (15) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Eselon IV sebagai kepala kantor dan yang setingkat | ... (15) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Eselon IV bukan kepala kantor | ... (15) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Pejabat Fungsional Gol. IV | ... (15) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Pejabat Fungsional Gol. III | ... (15) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Eselon V/Pelaksana | ... (15) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * pilih salah satu dengan tanda centang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mengetahui, Penanggung Jawab UAKPB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ... (12) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ... (13) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PETUNJUK PENGISIAN PROFIL UAKPB/SATUAN KERJA

| Nomor | Uraian Isian |
|-------|--|
| 1. | Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga. |
| 2. | Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)/satuan kerja. |
| 3. | Diisi dengan kode UAKPB/satuan kerja. |
| 4. | Diisi dengan mencentang pada kolom, yang sesuai dengan jenis UAKPB/satuan kerja. |
| 5. | Diisi dengan nama Jalan tempat UAKPB/satuan kerja berada. |
| 6. | Diisi dengan nama Kelurahan tempat UAKPB/satuan kerja berada. |
| 7. | Diisi dengan nama Kecamatan tempat UAKPB/satuan kerja berada. |
| 8. | Diisi dengan nama Kabupaten/Kota tempat UAKPB/satuan kerja berada. |
| 9. | Diisi dengan nama Provinsi tempat UAKPB/satuan kerja berada. |
| 10. | Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. |
| 11. | Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. |
| 12. | Diisi dengan nama KPB/Kepala satuan kerja. |
| 13. | Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP)/Nomor Registrasi Pokok (NRP) KPB/Kepala satuan kerja. |
| 14. | Diisi dengan Jabatan KPB/Kepala satuan kerja. |
| 15. | Diisi dengan jumlah orang yang berada di dalam UAKPB/satuan kerja (dengan angka). |

FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI

| No. | Nomor Formulir | Nama Formulir |
|-----|----------------|-------------------------|
| 1. | Form - 01 | Tanah |
| 2. | Form - 02.a | Bangunan |
| 3. | Form - 02.b | Bangunan Lainnya |
| 4. | Form - 03.a | Jalan |
| 5. | Form - 03.b | Jembatan |
| 6. | Form - 03.c | Jalan dan Jembatan Lain |
| 7. | Form - 03.d | Bendungan |
| 8. | Form - 03.e | Bendung |
| 9. | Form - 03.f | Bangunan Air Lainnya |

Form - 01

|  | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA | FORM -01 TANAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|--------------------------------|---|---|---|------|---|------|--|--|------|------|---|------|------|---|------|------|--|------|------|--|------|------|-------|------|--|
| FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang: | | No Unit (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama UAKPB (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode UAKPB (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Data Administrasi BMN | | NUP (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Barang (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Barang (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Merk/Type/Keterangan (7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Perolehan (8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luas (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kondisi (10) | | <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Data BMN Inventarisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fisik Barang (11) | | <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ditemukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesesuaian dengan Kode Barang (12) | | <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai <input type="checkbox"/> Belum tercatat / Barang Berlebih | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Barang (13) | | <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Barang (14) | | <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (14) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Merk/Type/Keterangan (15) | | <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Perolehan (16) | | <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (16) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kondisi (17) | | <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alamat Objek (18) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desa (19) | | Kab/Kota (21) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kec (20) | | Provinsi (22) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luas (23) m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Status Pengelolaan (24) | | <input type="checkbox"/> Telah terdapat persetujuan pemindahhantaran/penghapusan tetapi belum tertib SHK/Penghapusan <input type="checkbox"/> Belum terdapat persetujuan pemindahhantaran/penghapusan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Data Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penggunaan Sekitar (25) | | <input type="checkbox"/> Residensial <input type="checkbox"/> Komersial <input type="checkbox"/> Perkantoran Pemerintah <input type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Lain/2 (isi sendiri) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peruntukan Objek (26) | | <input type="checkbox"/> Residensial <input type="checkbox"/> Komersial <input type="checkbox"/> Perkantoran Pemerintah <input type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Lain/2 (no sendiri) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Data Pengelolaan Tanah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Penguasaan Saat Ini (27) | | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Uraian</td> <td style="width: 50%;">Nama Pengguna/benguasaan tanah</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Digunakan/dikuasai K/L atau satirir sendiri (28)</td> <td>(29)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Digunakan/dikuasai/satirir K/L lain atau permda (29)</td> <td>(30)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dikuasai pihak lain (30)</td> <td>(30)</td> </tr> </table> | Uraian | Nama Pengguna/benguasaan tanah | <input type="checkbox"/> Digunakan/dikuasai K/L atau satirir sendiri (28) | (29) | <input type="checkbox"/> Digunakan/dikuasai/satirir K/L lain atau permda (29) | (30) | <input type="checkbox"/> Dikuasai pihak lain (30) | (30) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian | Nama Pengguna/benguasaan tanah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Digunakan/dikuasai K/L atau satirir sendiri (28) | (29) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Digunakan/dikuasai/satirir K/L lain atau permda (29) | (30) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Dikuasai pihak lain (30) | (30) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Progress Sertifikasi (31) | | <input type="checkbox"/> Sudah Sertifikasi <input type="checkbox"/> Dalam Proses pembuatan <input type="checkbox"/> Belum dilakukan proses (tabel terlampir) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Bukti Kepermilikan (32) | | <input type="checkbox"/> SHP <input type="checkbox"/> HPL <input type="checkbox"/> SHGB <input type="checkbox"/> SHM <input type="checkbox"/> Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Pemegang Hak (34) | | <input type="checkbox"/> a.n. Pemerintah R/ c.n. K/L <input type="checkbox"/> a.n. K/L <input type="checkbox"/> a.n. K/L lain <input type="checkbox"/> a.n. Pihak Kanga/Permda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Jumlah Bidang Tanah (35) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. Sengketa Tanah (36) | | <input type="checkbox"/> Tidak Bersengketa <input type="checkbox"/> Sengketa Non Pengadilan <input type="checkbox"/> Sengketa Pengadilan <input type="checkbox"/> Pihak yang Bersengketa (37) <input type="checkbox"/> Permda <input type="checkbox"/> Badan Hukum <input type="checkbox"/> Masyarakat (Keterangan sengketa (38)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e. Status Penggunaan (39) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Uraian</th> <th style="width: 10%;">Luas (m²)</th> <th style="width: 40%;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> Digunakan sendiri (40)</td> <td>(40)</td> <td>(41)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dilakukan pemanfaatan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Sesuai persetujuan Menteri Keuangan</td> <td>(42)</td> <td>(43)</td> </tr> <tr> <td> b. Belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan</td> <td>(44)</td> <td>(45)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Digunakan oleh satirir K/L lain/pihak lain</td> <td>(46)</td> <td>(47)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Belum digunakan (ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan)</td> <td>(48)</td> <td>(49)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan</td> <td>(50)</td> <td>(51)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total</td> <td>(52)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Uraian | Luas (m ²) | Keterangan | <input type="checkbox"/> Digunakan sendiri (40) | (40) | (41) | <input type="checkbox"/> Dilakukan pemanfaatan | | | a. Sesuai persetujuan Menteri Keuangan | (42) | (43) | b. Belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan | (44) | (45) | <input type="checkbox"/> Digunakan oleh satirir K/L lain/pihak lain | (46) | (47) | <input type="checkbox"/> Belum digunakan (ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan) | (48) | (49) | <input type="checkbox"/> Tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan | (50) | (51) | Total | (52) | |
| Uraian | Luas (m ²) | Keterangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Digunakan sendiri (40) | (40) | (41) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Dilakukan pemanfaatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Sesuai persetujuan Menteri Keuangan | (42) | (43) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan | (44) | (45) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Digunakan oleh satirir K/L lain/pihak lain | (46) | (47) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Belum digunakan (ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan) | (48) | (49) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan | (50) | (51) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | (52) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f. Pihak yang memanfaatkan/mengoperasionalkan (53) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g. Kinerja/optimisasi aset (54) | | <input type="checkbox"/> Direkomendasikan pengukuran kinerja BMN <input type="checkbox"/> tidak direkomendasikan pengukuran kinerja BMN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h. Keterangan Lain-Lain (Nama Peruntukan Objek) (55) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-2-

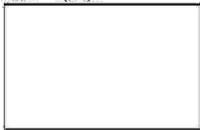
6. Lokasi Tanah

Koordinat GPS : (T : Bujur Timur, S : Lintang Selatan, E : Elevasi)

T S E

Batas-Batas Tanah : Utara :...(57)... Timur :...(59)...
Selatan :...(58)... Barat :...(60)...

7 Foto BMN :...(61)...

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
|---|---|--|---|

8. Keterangan Tambahan

...(62)...

Tanggal Pelaksanaan Pendataan, (63).....

Petugas Pendataan

...(64)...

...(65)...

PETUNJUK PENGISIAN FORM-01 TANAH

a. Penjelasan Umum

Form 01 - Tanah adalah Formulir yang digunakan untuk mencatat data dan informasi terkait BMN berupa Tanah yang tercatat dan/atau ditemukan dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

b. Cara Pengisian

- (1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
- (2) Diisi dengan kode UAKPB.
- (3) Diisi dengan nomor urut dalam Kertas Kerja Inventarisasi.
- (4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.
- (5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data administrasi.
- (6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan data administrasi).
- (7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan).
- (8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.
- (9) Diisi dengan luas sesuai dengan data administrasi.
- (10) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi.
- (11) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak Ditemukan", maka pengisian Form tidak perlu dilanjutkan.
- (12) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data administrasi dengan data hasil cek fisik.
Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada, selanjutnya dapat melanjutkan untuk angka (16) dan seterusnya.
Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan (kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
- (13) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (14) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (15) Diisi dengan merek/tipe/keterangan sesuai fisik BMN yang ada.
- (16) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai data menurut hasil cek fisik.
- (17) Diisi sesuai kondisi tanah pada saat cek fisik.
- (18) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor lokasi tanah berada.
- (19) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa lokasi tanah berada.
- (20) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi tanah berada.
- (21) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya lokasi tanah berada.
- (22) Diisi dengan nama Provinsi lokasi tanah berada.
- (23) Diisi dengan luas BMN (dalam m²/meter persegi).
- (24) Diisi dengan status pengelolaan BMN, apakah sudah ada persetujuan Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusan namun belum ditetapkan SK Penghapusan.
- (25) Diisi dengan penggunaan lahan di sekitar objek Penilaian. (Dapat pilih lebih dari satu pilihan). Pilihan lain selain untuk residensial (tempat tinggal), komersial, perkantoran pemerintah, dan industrial (isi sendiri).

- (26) Diisi dengan peruntukan objek Penilaian.
- (27) Diisi pada kolom sesuai dengan penguasaan tanah saat ini.
- (28) Diisi dengan nama pengguna/penguasa, jika dikuasai oleh satker/KL sendiri.
- (29) Diisi dengan nama pengguna/penguasa, jika dikuasai oleh satker/KL lain atau Pemda.
- (30) Diisi dengan nama pengguna/penguasa, jika dikuasai oleh pihak lain.
- (31) Diisi pada kolom sesuai dengan progres sertipikasi tanah.
- (32) Diisi dengan nomor dokumen kepemilikan.
- (33) Diisi pada kolom yang sesuai dengan jenis sertipikat tanah.
- (34) Diisi pada kolom yang sesuai dengan pemilik yang tertera pada sertipikat tanah.
- (35) Diisi dengan jumlah bidang tanah.
- (36) Diisi pada kolom yang sesuai dengan status sengketa tanah.
- (37) Diisi pada kolom yang sesuai dengan pihak yang bersengketa atas tanah.
- (38) Diisi dengan keterangan progres/perkembangan penyelesaian sengketa tanah dan informasi lain.
- (39) Diisi pada kolom yang sesuai dengan status penggunaan tanah (misalnya: penggunaan sesuai tusi, pemanfaatan (sewa, pinjam pakai, KSP, dsb.), penggunaan sementara, dan/atau tanah yang belum digunakan untuk penyelenggaraan tusi.
- (40) Diisi dengan luas lahan yang digunakan sendiri (tusi).
- (41) Diisi keterangan tambahan angka (40) seperti persetujuan PSP, dan lain sebagainya.
- (42) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (43) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada angka (42), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan, pinjam pakai, besaran PNBP, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya.
- (44) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (45) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada angka (44), seperti perjanjian antara pihak yang memanfaatkan dengan satker, besaran nilai pemanfaatan, jangka waktu, dan lain sebagainya yang dalam hal ini pemanfaatan tersebut belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
- (46) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain/pihak lain.
- (47) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana dimaksud pada angka (46), seperti persetujuan penggunaan sementara atau persetujuan pengoperasionalkan oleh pihak lain dalam rangka penyelenggaraan tusi satker oleh Menteri Keuangan.
- (48) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudah ada rencana untuk menggunakan/memanfaatkan BMN tersebut.
- (49) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (48).
- (50) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan/pemanfaatan.
- (51) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (50).
- (52) Diisi total luas penggunaan BMN (penjumlahan dari angka (40) s.d. angka (50)).
- (53) Diisi dengan pihak yang sedang memanfaatkan/menggunakan seperti satker lain/pihak lain (mitra kerjasama pemanfaatan BMN).

- (54) Diisi pada kolom direkomendasikan pengukuran kinerja BMN apabila BMN tersebut masih dapat dilakukan optimalisasi penggunaan/ pemanfaatan atau masih terdapat potensi pemanfaatan atas BMN tersebut, jika tidak maka diisi pada kolom Tidak direkomendasikan pengukuran kinerja BMN.
- (55) Diisi dengan keterangan lain, seperti: peruntukan tanah tersebut awalnya untuk pembangunan kantor, namun terjadi perubahan RUTR sehingga kantor dipindahkan ke lokasi yang lain.
Tanah ini merupakan pencatatan atas BMN berupa tanah yang baru dicatat karena dokumen hibah dari Pemda baru diterima.
- (56) Diisi dengan koordinat GPS dari lokasi tanah.
- (57) Diisi dengan batas sebelah utara dari tanah, seperti jalan raya, sungai, tanah milik a.n. ABC, sawah, dan lain sebagainya.
- (58) Diisi dengan batas sebelah selatan.
- (59) Diisi dengan batas sebelah timur.
- (60) Diisi dengan batas sebelah barat.
- (61) Diisi dengan foto BMN. Tampak Depan, samping, belakang, dan lain sebagainya yang menggambarkan kondisi terkini.
- (62) Diisi dengan keterangan tambahan, apabila ada, seperti tanah yang di atasnya berdiri rumah negara, kantor, dan lain sebagainya.
- (63) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.
- (64) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.
- (65) Diisi dengan NIP/NRP petugas pendataan BMN.

Form - 02.a



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

FORM - 02.a
BANGUNAN

FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI

1. Kuasa Pengguna Barang No Urut: (8)

Nama UAKPB (1)
Kode UAKPB (2)

2. Data Administrasi Awal BMN

Kode Barang (4)
Nama Barang (6) NUP (5)
Merk/Type/Keterangan (7)
Tanggal Perolehan (8)
Luas (9)

Kondisi (10) Baik Rusak Ringan Rusak Berat

3. Data BMN Inventarisasi

Fisik Barang (11) Ada Tidak Ditemukan
 Sesuai Tidak Sesuai Belum tercatat / Barang Benih

Kesesuaian (bandan, Kode Barang) (12) Sama Tidak sama (13)
Kode Barang (13)
Nama Barang (14)
Merk/Type/Keterangan (15)
Tanggal Perolehan/Selesai Dibangun (16) Tahun Renovasi (17)
Luas Bangunan (18) m²

Kondisi (19)

| Baik | | Rusak Ringan | Rusak Berat | |
|-------------|------|--------------|-------------|--------------|
| Baik Sekali | Baik | Sedang | Jelek | Jelek Sekali |

Alamat Objek (20)

| | |
|----------------|---------------|
| Jel./Desa (21) | Kab/Kota (23) |
| Kec (22) | Provinsi (24) |

Status Pengelolaan (25) Telah mendapat persetujuan pemindahtanganan/penghapusan, tetapi belum terbit SK Penghapusan
 Belum tidak terdapat persetujuan pemindahtanganan/penghapusan

4. Informasi Tanah Lokasi Bangunan

Pemilik Tanah (26) Serah Saluker Lain Pemua Pinak Lain

Kode Sektor (27)
Kode Barang (28)
NUP (29)

5. Data Penilaian

a. Jenis Bangunan Berdasarkan Fungsi (30)

| | | | |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Residensial <input type="checkbox"/> Rumah Tinggal/Dinas <input type="checkbox"/> Rumah Susuh <input type="checkbox"/> Mese/Asrama <input type="checkbox"/> Apartemen <input type="checkbox"/> Kondominium | <input type="checkbox"/> Komersial <input type="checkbox"/> Ruko/Rukan <input type="checkbox"/> Perkantoran <input type="checkbox"/> Pertokoan <input type="checkbox"/> Mall/Trade Center <input type="checkbox"/> Kantor Pemerintah | <input type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Pabrik <input type="checkbox"/> Gudang <input type="checkbox"/> Bengkel <input type="checkbox"/> Mezzanine <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Lain-Lain <input type="checkbox"/> Sekolah <input type="checkbox"/> Tempat ibadah <input type="checkbox"/> Gedung Pertemuan <input type="checkbox"/> Rumah Sakit <input type="checkbox"/> Hotel |
|--|---|---|---|

b. Fasilitas

Pagar Jenis (31) Panjang (32) m
Perkelasan Jenis (33) Luas (34) m²

Keterangan Lain-lain (35)

6. Data Pengelolaan BMN

a. Penggunaan Bangunan Per Lantai

Jumlah Lantai: (36)

| No. | Lantai Ke- | Luas Lantai (m ²) | | | | | Keterangan | |
|-----|------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|--|-----------------|------------|-------|
| | | Digunakan sendiri | Digunakan K/L (lain) & dioperasikan an Pihak lain | Dimanfaatkan | | Tidak digunakan | | |
| | | | | Sesuai persetujuan Menteri Keuangan | Belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan | | | Total |
| 1 | (37) | (38) | (39) | (40) | (41) | (42) | (43) | (44) |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |

Riuk yang dimanfaatkan/mangoperasikan (45)

-2-

b. Data Bangunan Rumah Negara (46)

| | | | | |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Golongan RN : | <input type="checkbox"/> Pejabat Negara/Gol I | <input type="checkbox"/> RN Gol II | <input type="checkbox"/> RN Gol III | <input type="checkbox"/> RN Non Golongan |
| Status Penghuni : | <input type="checkbox"/> Pejabat Negara /PNS/TNI/POLRI | <input type="checkbox"/> Pensiunan | <input type="checkbox"/> Keluarga | <input type="checkbox"/> Pihak Lain |
| Status RN Gol III : | <input type="checkbox"/> Sewa | <input type="checkbox"/> Sewa Beli | <input type="checkbox"/> Lunas | <input type="checkbox"/> Sertipikat Pihak Lain |

Dokumen Perjanjian Sewa Beli/Lunas : (47)

c. Kinerja/optimalisasi aset: (48) ..

Direkomendasikan pengukuran kinerja BMN
 Tidak direkomendasikan pengukuran kinerja BMN

d. Dokumen Bangunan : Tidak Ada Ada ..(49) ..

7. Foto BMN
..(50) ..

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

8. Keterangan Tambahan
..... (51)

Tanggal Pelaksanaan Pendataan ..(52) ..

Petugas Pendataan

..(53) ..

..(54) ..

FORM-02.a BANGUNAN

a. Penjelasan Umum

Form 02.a - Gedung dan Bangunan adalah Formulir yang digunakan untuk mencatat data dan informasi terkait dengan BMN berupa Gedung dan Bangunan yang tercatat dan/atau ditemukan dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Form ini sebagai bahan pembentukan nilai hasil Penilaian.

b. Cara Pengisian

- (1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
- (2) Diisi dengan kode Unit UAKPB.
- (3) Diisi dengan nomor urut dalam Kertas Kerja Inventarisasi.
- (4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.
- (5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data administrasi.
- (6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan data administrasi).
- (7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan).
- (8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.
- (9) Diisi dengan luas BMN sesuai dengan data administrasi.
- (10) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi.
- (11) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak Ditemukan", maka pengisian form tidak perlu dilanjutkan.
- (12) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data administrasi dengan data hasil cek fisik.
Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada, selanjutnya dapat melanjutkan untuk angka (16) dan seterusnya.
Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan (kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. angka (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
- (13) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (14) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (15) Diisi dengan merek/tipe/keterangan sesuai fisik BMN yang ada.
- (16) Diisi dengan tanggal perolehan/tanggal dibangun sesuai dengan data menurut hasil cek fisik.
- (17) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan renovasi apabila pernah dilakukan renovasi.
- (18) Diisi dengan luas BMN (dalam m²/meter persegi).
- (19) Diisi sesuai kondisi bangunan saat cek fisik.
- (20) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor lokasi tanah berada.
- (21) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa lokasi tanah berada.
- (22) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi tanah berada.
- (23) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya lokasi tanah berada.
- (24) Diisi dengan nama Provinsi lokasi tanah berada.

- (25) Diisi dengan status pengelolaan BMN, apakah sudah ada persetujuan Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusan namun belum ditetapkan SK Penghapusan.
- (26) Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah tempat bangunan berdiri. Sendiri, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik satker bersangkutan, selanjutnya, silahkan kode pencatatan tanah pada angka (27) beserta NUP pada angka (28).
Satker Lain, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik satker lain baik pada K/L yang sama atau K/L lain, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker tersebut pada angka (27), kode pencatatan tanah pada angka (28) beserta NUP pada angka (29).
Pemda, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik Pemerintah Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah dengan Pemda yang bersangkutan guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada bangunan yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu mengisi angka (27), angka (28), dan angka (29).
Pihak Lain, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah bukan merupakan milik Pemerintah Pusat atau Pemda. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebut, guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada bangunan yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut.
- (30) Diisi dengan mencentang pilihan Jenis Bangunan berdasarkan fungsi apakah termasuk dalam katagori bangunan Residensial, Komersial, Industrial, dan lain-lain.
- (31) Diisi hanya apabila terdapat fasilitas berupa pagar permanen, jika tidak ada, maka tidak perlu diisi.
- (32) Diisi panjang pagar sebagaimana tercantum pada angka (31).
- (33) Diisi hanya apabila terdapat fasilitas berupa perkerasan (berupa aspal, beton, batako, dsb), jika tidak ada, maka tidak perlu diisi.
- (34) Diisi luas perkerasan sebagaimana tercantum pada angka (33).
- (35) Diisi keterangan lain dari data bangunan untuk Penilaian, misalnya bangunan kantor yang menghadap depan lingkungan komersial dan menghadap belakang lingkungan industrial.
- (36) Diisi dengan jumlah lantai bangunan.
- (37) Diisi dengan nomor lantai gedung bangunan.
- (38) Diisi dengan luas lantai yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satker bersangkutan.
- (39) Diisi dengan luas lantai yang digunakan K/L lain atau Pemda.
- (40) Diisi dengan luas lantai yang sedang dalam status pemanfaatan (disewakan, pinjam pakai, dan lain sebagainya) yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
- (41) Diisi dengan luas lantai yang sedang dalam status pemanfaatan (disewakan, pinjam pakai, dan lain sebagainya) yang belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
- (42) Diisi dengan luas lantai yang sedang dalam kondisi tidak digunakan.
- (43) Diisi dengan total luas lantai keseluruhan.
- (44) Diisi dengan keterangan penggunaan untuk menjelaskan angka (38) s.d. angka (41), seperti persetujuan Menteri Keuangan untuk PSP, sewa, pinjam pakai, dan lain sebagainya, besaran PNBPN, dan jangka waktu penggunaan.
- (45) Diisi dengan mitra penggunaan untuk menjelaskan angka (38) s.d. angka (41), seperti lantai 3 digunakan oleh satker ABC, lantai 1 terdapat ATM, kantor bank, dan lain sebagainya.

- (46) Diisi apabila objek pendataan merupakan Bangunan Rumah Negara sesuai hasil pendataan, dengan mencentang salah satu pilihan yang ada, yaitu golongan rumah negara, status penghuni, dan status rumah negara dimaksud.
- (47) Diisi dengan nomor dan tanggal dokumen perjanjian sewa beli/lunas.
- (48) Diisi pada kolom direkomendasikan pengukuran kinerja BMN apabila BMN tersebut masih dapat dilakukan optimalisasi penggunaan/pemanfaatan atau masih terdapat potensi pemanfaatan atas BMN tersebut, jika tidak, maka diisi pada kolom Tidak direkomendasikan pengukuran kinerja BMN.
- (49) Diisi dengan dokumen bangunan, seperti nomor IMB, DED, dan lain sebagainya.
- (50) Diisi dengan foto BMN. Tampak Depan, samping, dalam/interior, dan belakang, dan lain sebagainya yang menggambarkan kondisi terkini.
- (51) Diisi dengan keterangan tambahan, apabila ada.
- (52) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.
- (53) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.
- (54) Diisi dengan NIP/NRP petugas pendataan BMN.

Keterangan untuk Golongan Rumah Negara (RN):

- [] RN Pejabat Negara/Gol I; artinya Bangunan berdasarkan SK Rumah Negara telah ditetapkan sebagai RN Golongan I.
- [] RN Gol II; artinya Bangunan berdasarkan SK Rumah Negara telah ditetapkan sebagai RN Golongan II.
- [] RN Gol III; artinya Bangunan berdasarkan SK Rumah Negara telah ditetapkan sebagai RN Golongan III.
- [] RN Non Golongan; artinya Bangunan berstatus sebagai Rumah Negara tetapi belum/tidak ditetapkan status Golongannya.

Keterangan terkait status penghuni:

- [] Pejabat Negara/PNS/TNI/POLRI, artinya bahwa penghuni yang menempati Rumah Negara saat ini merupakan pemegang Surat Ijin Penghunian (SIP) dan berstatus sebagai Pejabat Negara PNS/TNI/POLRI.
- [] Pensiunan, artinya bahwa penghuni yang menempati Rumah Negara dimaksud merupakan pemegang SIP dan saat ini telah berstatus Purnabakti/Pensiunan PNS/TNI/POLRI.
- [] Keluarga, artinya bahwa penghuni yang menempati Rumah Negara dimaksud bukan merupakan pemegang SIP, penghuni merupakan Istri/Suami dari pemegang SIP.
- [] Pihak Lain, artinya bahwa penghuni yang menempati Rumah Negara dimaksud bukan merupakan pemegang SIP, hubungan penghuni yang menempati Rumah Negara dimaksud dapat berupa: orang tua, anak, cucu, saudara kandung, hubungan kekerabatan, atau tidak punya hubungan kekerabatan.

Keterangan Khusus untuk BMN berupa Bangunan yang berstatus sebagai RUMAH NEGARA GOLONGAN III:

- [] Sewa, artinya saat ini penghuni merupakan penyewa dan berkewajiban merawat, memelihara, dan menggunakan sesuai dengan SIP Rumah Negara.
- [] Sewa Beli, artinya saat ini penghuni merupakan penyewa dengan opsi beli sesuai persetujuan Sewa Beli dari Pengelola Barang.
- [] Lunas; artinya seluruh kewajiban atas sewa beli sesuai dengan Persetujuan dari Pengelola Barang telah dilakukan seluruhnya oleh

penghuni, tetapi belum dilakukan serah terima kepemilikan.
|| Sertipikat Pihak Lain; artinya kepemilikan atas Rumah Negara Golongan III telah beralih kepada penghuni.

-2-

c. Kinerja optimalisasi aset (59)

Dirakomodasikan pengukuran kinerja BMN
 Tidak dirakomodasikan pengukuran kinerja BMN

7. Foto BMN (59)

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

8. Keterangan Tambahan (61)

Tanggal Pelaksanaan Pendataan: _____ (62)

Pejabat Pendataan:

(63)

(64) _____

PETUNJUK PENGISIAN FORM-02.b

a. Penjelasan Umum

Form 02.b - Bangunan Lainnya adalah Formulir yang digunakan untuk mendata dan mencatat informasi terkait dengan BMN berupa Bangunan selain Bangunan pada Form 02.a (Gedung dan Bangunan) yang tercatat dan/atau ditemukan dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Form ini digunakan sebagai bahan pembentukan nilai hasil Penilaian.

b. Cara Pengisian

- (1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
- (2) Diisi dengan kode UAKPB.
- (3) Diisi dengan nomor urut dalam Kertas Kerja Inventarisasi.
- (4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.
- (5) Diisi dengan NUP barang sesuai dengan data administrasi.
- (6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan data administrasi).
- (7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan).
- (8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.
- (9) Diisi dengan luas BMN sesuai dengan data administrasi.
- (10) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi.
- (11) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak Ditemukan", maka pengisian form tidak perlu dilanjutkan.
- (12) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data administrasi dengan data hasil cek fisik.
 Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada, centang kolom sama pada angka (13) s.d angka (16), selanjutnya isi angka (16) dan seterusnya.
 Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan (kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
 Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. angka (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
- (13) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (14) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (15) Diisi dengan merek/tipe/keterangan sesuai fisik BMN yang ada.
- (16) Diisi dengan tanggal perolehan/tanggal dibangun sesuai dengan hasil cek fisik.
- (17) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan renovasi apabila pernah dilakukan renovasi.
- (18) Diisi dengan luas BMN saat cek fisik.
- (19) Diisi sesuai kondisi bangunan saat cek fisik.
- (20) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor lokasi tanah berada.
- (21) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa lokasi tanah berada.
- (22) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi tanah berada.
- (23) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya lokasi tanah berada.
- (24) Diisi dengan nama Provinsi lokasi tanah berada.
- (25) Diisi dengan status pengelolaan BMN, apakah sudah ada persetujuan

Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusan namun belum ditetapkan SK Penghapusan.

- (26) Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah tempat bangunan berdiri. Sendiri, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik satker bersangkutan, selanjutnya, lanjut mengisi kode satker pada angka (27) kode pencatatan tanah pada angka (28) beserta NUP pada angka (29). Satker Lain, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik satker lain, baik pada K/L yang sama maupun K/L lain, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker tersebut pada angka (27), kode pencatatan tanah pada angka (28) beserta NUP pada angka (29). Pemda, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik Pemerintah Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah dengan Pemda yang bersangkutan guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada bangunan yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu mengisi angka (27), angka (28), dan angka (29). Pihak Lain, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah bukan merupakan milik Pemerintah Pusat atau Pemda. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebut, guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada bangunan yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut.
- (30) Diisi dengan jenis BMN sesuai dengan hasil pendataan, misal: tugu, menara baja siku 4 kaki, menara guyed, menara ATC, dan lain-lain.
- (31) Diisi kedalaman/ketinggian BMN.
- (32) Diisi tebal plat atau dinding BMN.
- (33) Diisi total volume BMN.
- (34) Diisi keterangan lainnya BMN tersebut, seperti identitas bangunan, seperti nama objek sesuai penggunaannya.
- (35) Diisi bahan/material BMN tersebut.
- (36) Diisi dengan panjang total BMN tersebut.
- (37) Diisi dengan lebar total BMN tersebut.
- (38) Diisi dengan luas total BMN tersebut. Perkalian dari angka (36) dan angka (37)
- (39) Diisi hanya apabila terdapat fasilitas berupa pagar permanen, jika tidak ada, maka tidak perlu diisi.
- (40) Diisi panjang pagar sebagaimana tercantum pada angka (39).
- (41) Diisi hanya apabila terdapat fasilitas berupa perkerasan (berupa aspal, beton, batako, dsb), jika tidak ada, maka tidak perlu diisi.
- (42) Diisi luas perkerasan sebagaimana tercantum pada angka (41).
- (43) Diisi keterangan lainnya terkait data Penilaian.
- (44) Diisi status penggunaan BMN tersebut.
- (45) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tugas satker.
- (46) Diisi keterangan tambahan pada angka (45), seperti Persetujuan PSP, dsb.
- (47) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (48) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (47), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan, besaran PNBK, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya.
- (49) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (50) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka

- (49), seperti perjanjian antara pihak yang memanfaatkan dengan satker, besaran nilai pemanfaatan, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya yang dalam hal ini pemanfaatan tersebut belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
- (51) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain/pihak lain.
 - (52) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana tercantum pada angka (51), seperti persetujuan penggunaan sementara atau persetujuan pengoperasionalan oleh pihak lain untuk penyelenggaraan tuis satker, jangka waktu penggunaan/operasional oleh pihak lain, dan lain sebagainya.
 - (53) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudah ada rencana untuk menggunakan/memanfaatkan BMN tersebut.
 - (54) Diisi keterangan untuk luas BMN sebagaimana dimaksud pada angka (53).
 - (55) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan/pemanfaatan.
 - (56) Diisi keterangan untuk luas BMN sebagaimana dimaksud pada angka (53).
 - (57) Diisi total luas penggunaan BMN.
 - (58) Diisi dengan pihak yang sedang memanfaatkan/menggunakan seperti satker lain/pihak lain (mitra kerjasama pemanfaatan BMN).
 - (59) Diisi pada kolom direkomendasikan pengukuran kinerja BMN apabila BMN tersebut masih dapat dilakukan optimalisasi penggunaan/pemanfaatan atau masih terdapat potensi pemanfaatan atas BMN tersebut, jika tidak maka diisi pada kolom Tidak direkomendasikan pengukuran kinerja BMN.
 - (60) Diisi dengan foto BMN. Tampak Depan, samping, dalam/interior, dan belakang. Dan lain sebagainya yang menggambarkan kondisi terkini.
 - (61) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada.
 - (62) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.
 - (63) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.
 - (64) Diisi dengan NIP/NRP petugas pendataan BMN.

Form - 03.a

| | | |
|---|--|---|
|  | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA | FORM - 03.a JALAN |
| FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI | | |
| 1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang | | No Urut: (3) |
| Nama UAKPB : |(1)..... | |
| Kode UAKPB : |(2)..... | |
| 2. Data Administrasi BMN | | |
| Kode Barang : |(4)..... | NUP :.....(5)..... |
| Nama Barang : |(6)..... | |
| Merk/Type/Keterangan : |(7)..... | |
| Tanggal Perolehan : |(8)..... | |
| Kondisi (9) : | <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat | |
| 3. Data BMN Inventarisasi | | |
| Fisik Barang (10) : | <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ditemukan | |
| Kesesuaian dengan Kode Barang (11) : | <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai <input type="checkbox"/> Belum tercatat / Barang Berlebih | |
| Kode Barang : | <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama,(12)..... | |
| Nama Barang : | <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama,(13)..... | |
| Merk/Type/Keterangan : | <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama,(14)..... | |
| Tanggal Perolehan/Bangun : | <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama,(15)..... | Tahun Perbaikan :.....(16)..... |
| Kondisi (17) : | <input type="checkbox"/> Baik Sekali <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat <input type="checkbox"/> Jelek <input type="checkbox"/> Jelek Sekali | |
| Alamat Objek : |(18)..... | |
| | Kel/Desa:(19)..... | Kab./Kota:(21)..... |
| | Kec.:(20)..... | Provinsi:(22)..... |
| Status Pengelolaan (23) : | <input type="checkbox"/> Telah terbit persetujuan pemindahalangan/penghapusan tetapi belum terbit SK Penghapusan <input type="checkbox"/> Belum terbit persetujuan pemindahalangan/penghapusan | |
| 4. Informasi Tanah Lokasi Jalan | | |
| Pemilik Tanah (24) : | <input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Satker Lain <input type="checkbox"/> Pihak Lain | |
| Kode Satker : |(25)..... | |
| Kode Barang : |(26)..... | |
| NUP : |(27)..... | |
| 5. Data Penilaian | | |
| <input type="checkbox"/> 1. JALAN DARAT (28) | | |
| Klasifikasi Jenis : |(29)..... | Luas Total :.....(32)..... m ² |
| Jalan Kelas : |(30)..... | Panjang Jalan :.....(33)..... m |
| Fungsi : |(31)..... | Lebar Jalan :.....(34)..... m |
| Lapisan Permukaan : | <input type="checkbox"/> Beton :.....(35)..... m <input type="checkbox"/> Aspal :.....(36)..... m <input type="checkbox"/> Interblock :.....(37)..... m | Kondisi (38) : <input type="checkbox"/> Sangat Baik <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Jelek <input type="checkbox"/> Jelek Sekali |
| Komponen Pelengkap : | <input type="checkbox"/> Kanstein :.....(39)..... m <input type="checkbox"/> Batu Kali :.....(40)..... m <input type="checkbox"/> Guard Rail :.....(41)..... m | Kondisi (42) : <input type="checkbox"/> Sangat Baik <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Jelek <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Jelek Sekali |
| Tahun Pelapisan : |(43)..... | Tahun Diperbaiki/Pemeliharaan :.....(44)..... |
| Keterangan Lain-lain : |(45)..... | |
| <input type="checkbox"/> 2. JALAN KERETA API (46) | | |
| Jenis Rel : | <input type="checkbox"/> R30 :.....(47)..... m <input type="checkbox"/> R42 :.....(48)..... m <input type="checkbox"/> R50 :.....(49)..... m <input type="checkbox"/> R54 :.....(50)..... m | Bantalan : <input type="checkbox"/> Beton :.....(51)..... m <input type="checkbox"/> Kayu :.....(52)..... m <input type="checkbox"/> Besi :.....(53)..... m Wesel : <input type="checkbox"/> Biasa :.....(54)..... unit <input type="checkbox"/> Inggris :.....(55)..... unit |
| Keterangan Lain-lain : |(56)..... | |

-2-

6. Data Pengelolaan BMN

Status Penggunaan (57)

| Uraian | Luas (m ²) | Keterangan |
|---|------------------------|------------|
| Digunakan sendiri | ..(68).. | ..(59).. |
| Dilakukan pemanfaatan | | |
| a. Sesuai persetujuan Menteri Keuangan | (60) | ..(61).. |
| b. Belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan | ..(62).. | ..(63).. |
| Digunakan oleh satker K/L lain atau dioperasikan pihak lain | (64) | ..(65).. |
| Belum digunakan (ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan) | ..(66).. | ..(67).. |
| Tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan | ..(68).. | ..(69).. |
| Total | ..(70).. | |
| Pihak Lain yang memanfaatkan: | | |
| ..(71).. | | |

7. Foto BMN ..(72)..

8. Keterangan Tambahan

..(73)..

Tanggal Pelaksanaan Pendataan ..(74)..

Petugas Pendataan:

..(75)..

..(76)..

PETUNJUK PENGISIAN FORM-03.a

a. Penjelasan Umum

Form 03.a - Jalan adalah Formulir yang digunakan untuk mendata dan mencatat informasi terkait dengan BMN berupa Jalan yang tercatat dan/atau ditemukan dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Form ini digunakan sebagai bahan pembentukan nilai hasil Penilaian.

b. Cara Pengisian

- (1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
- (2) Diisi dengan kode Unit UAKPB.
- (3) Diisi dengan nomor urut dalam Kertas Kerja Inventarisasi.
- (4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.
- (5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data administrasi.
- (6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan data administrasi).
- (7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan).
- (8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.
- (9) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi.
- (10) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak Ditemukan", maka pengisian form tidak perlu dilanjutkan.
- (11) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data administrasi dengan data hasil cek fisik.
Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada, centang kolom sama pada angka (12) s.d angka (15) selanjutnya isi angka (16) dan seterusnya.
Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan (kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. angka (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
- (12) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (13) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (14) Diisi dengan merek/tipe/keterangan sesuai fisik BMN yang ada.
- (15) Diisi dengan tanggal perolehan/dibangun sesuai dengan data menurut hasil cek fisik.
- (16) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan perbaikan apabila pernah dilakukan perbaikan.
- (17) Diisi dengan kondisi Jalan, jika:
 1. Baik Sekali:
Umumnya tidak retak, hanya sedikit deformasi pada jalur roda.
 2. Baik:
Terlihat adanya retak halus, sedikit deformasi pada jalur roda namun masih tetap stabil.
 3. Sedang:
Terlihat adanya retak sedang, terdapat beberapa deformasi pada jalur roda, pada dasarnya masih menunjukkan kestabilan.

4. Jelek:
Retak banyak, demikian juga deformasi pada jalur roda, menunjukkan gejala ketidakstabilan.
 5. Jelek Sekali:
Retak merata dan banyak berlubang, sebagian besar mengalami deformasi dan tidak stabil.
- Diisi dengan kondisi Jalan Rel, jika:
1. Baik Sekali:
Konstruksi Jalan Kereta Api dalam kondisi masih prima dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik. Secara keseluruhan, jalan dalam kondisi ini dapat dikatakan sangat terawat.
 2. Baik:
Konstruksi Jalan Kereta Api kondisinya masih dalam keadaan keadaan utuh dan berfungsi dengan baik namun perlu mengalami perbaikan kecil. Secara keseluruhan, jalan dalam kondisi ini dapat dikatakan terawat.
 3. Sedang:
Konstruksi Jalan Kereta Api kondisinya masih dalam keadaan baik namun telah mengalami deformasi/korosi yang ringan. Secara keseluruhan, jalan dalam kondisi ini dapat dikatakan cukup terawat.
 4. Jelek:
Konstruksi Jalan Kereta Api dalam kondisi jelek, dan sudah mengalami deformasi/korosi berat. Secara keseluruhan, jalan dalam kondisi ini dapat dikatakan tidak terawat.
 5. Jelek Sekali:
Konstruksi Jalan Kereta Api dalam kondisi sangat jelek, mengalami deformasi/korosi berat dan sudah tidak bisa dilalui. Secara keseluruhan, jalan dalam kondisi ini dapat dikatakan terbengkalai.
- (18) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor lokasi tanah berada.
- (19) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa lokasi tanah berada.
- (20) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi tanah berada.
- (21) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya lokasi tanah berada
- (22) Diisi dengan nama Provinsi lokasi tanah berada.
- (23) Diisi dengan status pengelolaan BMN, apakah sudah ada persetujuan Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusan namun belum ditetapkan SK Penghapusan.
- (24) Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah tempat bangunan berdiri. Sendiri, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik satker bersangkutan, selanjutnya, silahkan kode pencatatan tanah pada angka (26) beserta NUP pada angka (27).
Satker Lain, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik satker lain baik pada K/L yang sama maupun K/L lain, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker tersebut pada angka (25), kode pencatatan tanah pada angka (26) beserta NUP pada angka (27).
Pemda, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik Pemerintah Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah dengan Pemda yang bersangkutan guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada bangunan yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu mengisi angka (25), angka (26), dan angka (27).
Pihak Lain, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah bukan merupakan milik Pemerintah Pusat atau Pemda. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebut, guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada bangunan yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut.

- (25) Diisi kode satker yang menguasai tanah tempat BMN tersebut berdiri.
- (26) Diisi kode barang tanah tempat BMN tersebut berdiri.
- (27) Diisi NUP tanah tempat BMN tersebut berdiri.
- (28) Diisi dengan mencentang jika BMN berupa Jalan Darat.
- (29) Diisi dengan jenis Jalan seperti Jalan Antar Kota atau Jalan Perkotaan.
- (30) Diisi dengan kelas Jalan, seperti kelas I, II, III A, III B, III C untuk Jalan Antar Kota dan kelas I, II, III A, III B1, III B2, atau III C untuk Jalan Perkotaan.
- (31) Diisi dengan fungsi Jalan, seperti Arteri, Kolektor, atau Lokal untuk Jalan Antar Kota dan Arteri Primer, Arteri Sekunder, Kolektor Primer, Kolektor Sekunder, Lokal, atau Lingkungan/Parkir untuk Jalan Perkotaan.
- (32) Diisi dengan luas total Jalan (perkalian dari angka (33) dan angka (34)).
- (33) Diisi dengan panjang Jalan.
- (34) Diisi dengan lebar Jalan.
- (35) Diisi dengan panjang Jalan yang lapisan permukaannya merupakan beton.
- (36) Diisi dengan panjang Jalan yang lapisan permukaannya merupakan aspal.
- (37) Diisi dengan panjang Jalan yang lapisan permukaannya merupakan *interblok* (batako).
- (38) Diisi dengan kondisi permukaan jalan.
 - 1. Sangat Baik:
Umumnya tidak retak, hanya sedikit deformasi pada jalur roda.
 - 2. Baik:
Terlihat adanya retak halus, sedikit deformasi pada jalur roda namun masih tetap stabil.
 - 3. Sedang:
Terlihat adanya retak sedang, terdapat beberapa deformasi pada jalur roda, pada dasarnya masih menunjukkan kestabilan.
 - 4. Jelek:
Retak banyak, demikian juga deformasi pada jalur roda, menunjukkan gejala ketidakstabilan.
- (39) Diisi dengan panjang komponen pelengkap berupa *kanstein*.
- (40) Diisi dengan panjang komponen pelengkap berupa batu kali.
- (41) Diisi dengan panjang komponen pelengkap berupa *guard rail*.
- (42) Diisi dengan kondisi komponen pelengkap jalan pada angka (38) s.d. angka (40).
 - 1. Sangat Baik:
Secara keseluruhan, pelengkap dalam kondisi ini dapat dikatakan sangat terawat.
 - 2. Baik:
Secara keseluruhan, pelengkap dalam kondisi ini dapat dikatakan terawat.
 - 3. Sedang:
Secara keseluruhan, pelengkap dalam kondisi ini dapat dikatakan cukup terawat.
 - 4. Jelek:
Secara keseluruhan, pelengkap dalam kondisi ini dapat dikatakan tidak terawat.
 - 5. Jelek Sekali:
Secara keseluruhan, pelengkap dalam kondisi ini dapat dikatakan terbengkalai.

- (43) Diisi dengan tahun dilakukannya pelapisan.
- (44) Diisi dengan tahun dilakukannya perbaikan terakhir yang dikapitalisasi.
- (45) Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan terkait dengan Jalan yang dinilai.
- (46) Diisi dengan mencentang jika BMN berupa Jalan Kereta Api.
- (47) Diisi dengan panjang Rel R30.
- (48) Diisi dengan panjang Rel R42.
- (49) Diisi dengan panjang Rel R50.
- (50) Diisi dengan panjang Rel R54.
- (51) Diisi dengan panjang bantalan Rel yang berupa beton.
- (52) Diisi dengan panjang bantalan Rel yang berupa kayu.
- (53) Diisi dengan panjang bantalan Rel yang berupa besi.
- (54) Diisi dengan jumlah wesel biasa.
- (55) Diisi dengan jumlah wesel inggris.
- (56) Diisi keterangan tambahan terkait jalan kereta api.
- (57) Diisi pada kolom yang sesuai dengan status penggunaan jalan (misalnya: penggunaan sesuai tusi, pemanfaatan (sewa, pinjam pakai, KSP, dsb.), penggunaan sementara, dan/atau tanah yang belum digunakan untuk penyelenggaraan tusi.
- (58) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tusi satker.
- (59) Diisi keterangan tambahan pada angka (58), seperti Persetujuan PSP, dan lain sebagainya.
- (60) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dan lain sebagainya) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (61) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (60), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan, besaran PNBK, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya.
- (62) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dan lain sebagainya) yang belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (63) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (62), seperti perjanjian antara pihak yang memanfaatkan dengan satker, besaran nilai pemanfaatan, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya yang dalam hal ini pemanfaatan tersebut belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
- (64) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain atau pihak lain.
- (65) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana tercantum pada angka (64), seperti persetujuan oleh Menteri Keuangan atas penggunaan sementara atau persetujuan pengoperasionalan oleh pihak lain untuk penyelenggaraan tusi satker, jangka waktu penggunaan, dan lain sebagainya.
- (66) Diisi luas BMN yang belum digunakan, namun sudah ada rencana untuk menggunakan BMN tersebut.
- (67) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (66).
- (68) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan/pemanfaatan.

- (69) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (68).
- (70) Diisi total luas penggunaan BMN (penjumlahan angka 58 s.d. angka 68).
- (71) Diisi dengan keterangan pihak yang sedang memanfaatkan/menggunakan BMN seperti satker lain/pihak lain (mitra kerjasama pemanfaatan BMN).
- (72) Diisi dengan foto BMN. Tampak depan, samping, atas, dan lain sebagainya yang menggambarkan kondisi terkini.
- (73) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada.
- (74) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.
- (75) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.
- (76) Diisi dengan NIP/NRP petugas pendataan BMN.

Form - 03.b

| | | |
|---|---|--|
|  | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA | FORM - 03.b JEMBATAN |
| FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI | | |
| 1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang | | No. Urut: (3) |
| Nama UAKPB | (1) | |
| Kode UAKPB | (2) | |
| 2. Data Administrasi BMN | | |
| Kode Barang | (4) | Nilai (5) |
| Nama Barang | (6) | |
| Merk/Type/Keterangan | (7) | |
| Tanggal Perolehan | (8) | |
| Kondisi (9) | <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat | |
| 3. Data BMN Inventarisasi | | |
| Fisik Barang (10) | <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ditemukan | |
| Kesesuaian dengan Kode Barang (11) | <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai <input type="checkbox"/> Belum tercatat / Barang Berubah | |
| Kode Barang | <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (12) | |
| Nama Barang | <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (13) | |
| Merk/Type/Keterangan | <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (14) | |
| Tanggal Perolehan/Bangun | <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (15) | Tahun Perbaikan (16) |
| Kondisi Jembatan (17) | <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat <input type="checkbox"/> Baik Sekali <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Jelek <input type="checkbox"/> Jelek Sekali | |
| Alamat Objek (18) | Kel./Desa (19) Kab./Kota (21) | |
| | Kec. (20) Provinsi (22) | |
| Status Pengelolaan (23) | <input type="checkbox"/> Telah terbit persetujuan pemindahtanganan/penghapusan tetapi belum terbit SK Penghapusan <input type="checkbox"/> Belum terbit persetujuan pemindahtanganan/penghapusan | |
| 5. Data Penilaian | | |
| Kondisi Tanah (24) | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 | |
| Detail Posisi Jembatan (25) | | |
| Jenis Jembatan (26) | <input type="checkbox"/> Box Culvert <input type="checkbox"/> Beton Flat Slab <input type="checkbox"/> Beton Balok <input type="checkbox"/> Beton Prefabrikasi <input type="checkbox"/> Gelagar Baja <input type="checkbox"/> Rangka Baja Lainnya (27) | |
| Panjang Jembatan (28) | m | Tinggi Pilar (31) m |
| Lebar Jembatan (29) | m | Lebar Trotoar (32) m |
| Luas Jembatan (30) | m ² | Jumlah Tumpuan (33) |
| Perkerasan Lantai (36) | | Panjang Kerb (34) m |
| Pantang (37) | m | Posisi Jembatan <input type="checkbox"/> Berada di atas Sungai <input type="checkbox"/> Tidak Berada di atas Sungai |
| Lebar (38) | m | (35) |
| Sambungan Jumlah (39) | | Panjang (40) m |
| Sandaran Bahan (41) | | Panjang (42) m |
| Tiang Sandaran Bahan (43) | | Jumlah (44) |
| Keterangan Lain-lain (45) | | |
| 6. Data Pengelolaan BMN | | |
| Status Penggunaan (46) | | |
| | Urutan | Luas (m ²) |
| <input type="checkbox"/> | Digunakan sendiri | (47) |
| <input type="checkbox"/> | Digunakan dimanfaatkan | (48) |
| <input type="checkbox"/> | a. Sesuai persetujuan Menteri Keuangan | (49) |
| <input type="checkbox"/> | b. Belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan | (51) |
| <input type="checkbox"/> | Digunakan oleh satker K/L lain atau dioperasikan pihak lain | (53) |
| <input type="checkbox"/> | Belum digunakan (ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan) | (55) |
| <input type="checkbox"/> | Tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan | (57) |
| | Total | (59) |
| <input type="checkbox"/> | Pihak Lain yang memanfaatkan (60) | |

-2-

7. Foto BMN ..(61)..

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

8. Keterangan Tambahan

..(62)..

Tanggal Pelaksanaan Pendataan ..(63)..

Petugas Pendataan

..(64)

..(65)..

PETUNJUK PENGISIAN FORM-03.b

a. Penjelasan Umum

Form 03.b - Jembatan adalah Formulir yang digunakan untuk mendata dan mencatat informasi terkait dengan BMN berupa Jembatan yang tercatat dan/atau ditemukan dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Form ini digunakan sebagai bahan pembentukan nilai hasil Penilaian.

b. Cara Pengisian

- (1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
- (2) Diisi dengan kode UAKPB.
- (3) Diisi dengan nomor urut dalam Kertas Kerja Inventarisasi.
- (4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.
- (5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data administrasi.
- (6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan data administrasi).
- (7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan).
- (8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.
- (9) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi.
- (10) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak Ditemukan", maka pengisian form tidak perlu dilanjutkan.
- (11) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data administrasi dengan data hasil cek fisik.
 Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada, centang kolom sama pada angka (12) s.d angka (15) selanjutnya isi angka (16) dan seterusnya.
 Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan (kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
 Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. angka (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
- (12) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (13) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (14) Diisi dengan merek/tipe sesuai fisik BMN yang ada.
- (15) Diisi dengan tanggal perolehan/dibangun sesuai dengan data menurut hasil cek fisik.
- (16) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan perbaikan apabila pernah dilakukan perbaikan.
- (17) Diisi dengan kondisi Jembatan, jika:
 1. Baik Sekali:
 Jembatan dalam keadaan baru, tanpa kerusakan, elemen jembatan berada dalam kondisi baik.
 2. Baik:
 Kerusakan sangat sedikit (dapat diperbaiki dengan pemeliharaan rutin dan tidak berdampak pada keamanan atau fungsi jembatan).
 Contoh: *Scour* sedikit, karat pada permukaan, papan kayu longgar.

3. Sedang:

Kerusakan yang memerlukan pemantauan dan pemeliharaan pada masa yang akan datang. Contoh: pembusukan sedikit pada struktur kayu, penurunan mutu pada elemen pasangan batu, penumpukan sampah atau tanah di sekitar perletakan, kesemuanya merupakan tanda-tanda yang membutuhkan penggantian.

4. Jelek:

Kerusakan yang membutuhkan perhatian (kerusakan yang mungkin serius dalam 12 bulan). Contoh: struktur beton sedikit retak, kayu yang membusuk, lubang pada permukaan lantai kendaraan dan pada kepala jembatan, *scouring* dalam jumlah sedang pada pilar/kepala jembatan, rangka sudah mulai berkarat.

5. Jelek Sekali:

Kondisi kritis; (kerusakan serius yang membutuhkan penanganan segera). Contoh: kegagalan rangka, keretakan beton yang memiliki tulangan yang terlihat dan berkarat, sandaran pegangan/pagar pengaman tidak ada. Elemen runtuh atau tidak berfungsi lagi. Contoh bangunan atas yang runtuh, timbunan tanah yang hanyut.

- (18) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor lokasi BMN berada.
- (19) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa lokasi BMN berada.
- (20) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi BMN berada.
- (21) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya lokasi BMN berada.
- (22) Diisi dengan nama Provinsi lokasi BMN berada.
- (23) Diisi dengan status pengelolaan BMN, apakah sudah ada persetujuan Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusan namun belum ditetapkan SK Penghapusan.
- (24) Diisi dengan kondisi tanah.
 - 1: Bila tanah asli keras padat
 - 2: Bila tanah asli agak keras tertanam di air
 - 3: Bila tanah mengandung pasir atau tanahnya liat tertanam di air atau rawa.
- (25) Diisi dengan detail posisi jembatan berada:
Sebutkan berada di atas sungai atau jalan apa dan menghubungkan jalan apa.
- (26) Diisi dengan jenis Jembatan.
- (27) Diisi dengan jenis Jembatan Lainnya yang tidak terdapat pada pilihan.
- (28) Diisi panjang Jembatan.
- (29) Diisi dengan lebar Jembatan.
- (30) Diisi dengan luas Jembatan.
- (31) Diisi dengan tinggi pilar Jembatan.
- (32) Diisi dengan lebar trotoar pada Jembatan.
- (33) Diisi dengan jumlah tumpuan Jembatan.
- (34) Diisi dengan panjang *kerb*.
- (35) Diisi dengan posisi Jembatan.
- (36) Diisi dengan jenis perkerasan lantai Jembatan.
- (37) Diisi panjang perkerasan lantai Jembatan.
- (38) Diisi dengan lebar lantai jembatan.
- (39) Diisi dengan jumlah sambungan.
- (40) Diisi dengan panjang sambungan.
- (41) Diisi dengan jenis bahan sandaran (contoh: Pipa, Baja).
- (42) Diisi dengan panjang sandaran.
- (43) Diisi dengan jenis bahan tiang sandaran (contoh: Beton, Baja).
- (44) Diisi dengan jumlah sandaran.
- (45) Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
- (46) Diisi dengan mencentang kotak status penggunaan BMN yang sesuai

kondisi terkini.

- (47) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tugas satker.
- (48) Diisi keterangan tambahan pada angka (47), seperti Persetujuan PSP, dan lain sebagainya.
- (49) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dan lain sebagainya) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (50) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (49), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan, besaran PNBK, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya.
- (51) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (52) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (51), seperti perjanjian dengan pihak yang memanfaatkan, besaran nilai pemanfaatan, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya.
- (53) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain atau pihak lain.
- (54) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana tercantum pada angka (53), seperti persetujuan penggunaan sementara, pengoperasian oleh pihak lain dalam rangka tugas, jangka waktu penggunaan, dan lain sebagainya.
- (55) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudah ada rencana untuk menggunakan BMN tersebut.
- (56) Diisi keterangan untuk luas pada angka (55).
- (57) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan/pemanfaatan.
- (58) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (57).
- (59) Diisi total luas penggunaan BMN.
- (60) Diisi dengan keterangan pihak yang sedang memanfaatkan BMN tersebut.
- (61) Diisi dengan foto BMN.
- (62) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada.
- (63) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.
- (64) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.
- (65) Diisi dengan NIP/NRP petugas pendataan BMN.

Form - 03.c

| | | |
|--|--|--|
|  | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA | FORM - 03.c JALAN DAN JEMBATAN LAIN |
| FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI | | |
| 1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang | | No Urut: (3) |
| Nama UAK/PB | (1) | |
| Kode UAK/PB | (2) | |
| 2. Data Administrasi BMN | | |
| Kode Barang | (4) | NUP (5) |
| Nama Barang | (6) | |
| Merk/Type/Keterangan | (7) | |
| Tanggal Perolehan | (8) | |
| Kondisi (9) | <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat | |
| 3. Data BMN Inventarisasi | | |
| Fisik Barang (10) | <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ditemukan | |
| Kesesuaian dengan Kode Barang (11) | <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai <input type="checkbox"/> Belum tercatat /Barang Berlebih | |
| Kode Barang | <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (12) | |
| Nama Barang | <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (13) | |
| Merk/Type/Keterangan | <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (14) | |
| Tanggal Perolehan/Bangun | <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (15) Tahun Perbaikan (16) | |
| Kondisi (17) | <input type="checkbox"/> Baik Sekali <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat | <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Jelek <input type="checkbox"/> Jelek Sekali |
| Alamat Objek (18) | Kel/Desa (19) Kab/Kota (21) | Provinsi (22) |
| Status Pengelolaan (23) | <input type="checkbox"/> Telah terbit persetujuan pemindahtanganan/pengehapusan tetapi belum terbit SK Pengehapusan <input type="checkbox"/> Belum terbit persetujuan pemindahtanganan/pengehapusan | |
| 4. Informasi Tanah Lokasi Jalan Lain | | |
| Pemilik Tanah (24) | <input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Satker Lain <input type="checkbox"/> Pihak Lain | |
| Rute Satker (25) | | |
| Kode Barang (26) | | |
| NUP (27) | | |
| 5. Data Penilaian (28) | | |
| <input type="checkbox"/> 1 LANDING PAVIL PESAWAT TERBANG, (SERTA TAXIWAY ATAU APRON) | | |
| Runway | Luas (29) m ² | <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Rumpur |
| Overrun | Luas (30) m ² | <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Rumpur |
| Turning Area | Luas (31) m ² | <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Rumpur |
| Runway Shoulder | Luas (32) m ² | <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Rumpur |
| Exit Taxiway | Luas (33) m ² | <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Rumpur |
| Rapid Exit Taxiway | Luas (34) m ² | <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Rumpur |
| Parallel Taxiway | Luas (35) m ² | <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Rumpur |
| Taxiway Shoulder | Luas (36) m ² | <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Rumpur |
| Apron | Luas (37) m ² | <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Rumpur |
| Apron Helipad | Luas (38) m ² | <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Rumpur |
| Taxiway Helipad | Luas (39) m ² | <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Rumpur |
| Holdring Bay | Luas (40) m ² | <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Rumpur |
| Cleanway | Luas (41) m ² | |
| RESA | Luas (42) m ² | |
| Runway Strip | Luas (43) m ² | |
| Marking | Luas (44) m ² | |
| <input type="checkbox"/> 2 Jetty | | |
| Luas (45) m ² | Causeway | Luas (46) m ² |
| Keterangan Lain-lain (47) | | |

-2-

6. Data Pengelolaan BMN

Status Penggunaan (48)

| Uraian | Luas (m ²) | Keterangan |
|---|------------------------|------------|
| Digunakan sendiri | ..(49).. | ..(50).. |
| Dilakukan pemanfaatan | | |
| a. Sesuai persetujuan Menteri Keuangan | ..(51).. | ..(52).. |
| b. Belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan | ..(53).. | ..(54).. |
| Digunakan oleh satker K/L lain atau dioperasikan pihak lain | ..(55).. | ..(56).. |
| Belum digunakan (ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan) | ..(57).. | ..(58).. |
| Tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan | ..(59).. | ..(60).. |
| Total | ..(61).. | |

Pihak Lain yang memanfaatkan:
(62)

7. Foto BMN ..(63)..

8. Keterangan Tambahan
..(64)..

Tanggal Pelaksanaan Pendataan: ..(65)..

Petugas Pendataan

..(66)..

..(67)..

PETUNJUK PENGISIAN FORM - 03.c

a. Penjelasan Umum

Form 03.c - Jalan dan Jembatan Lain (JL) adalah Formulir yang digunakan untuk mendata dan mencatat informasi terkait dengan BMN berupa JL yang tercatat dan/atau ditemukan dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Form ini bahan pembentukan nilai hasil Penilaian.

b. Cara Pengisian

- (1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
- (2) Diisi dengan kode UAKPB.
- (3) Diisi dengan nomor urut dalam Kertas Kerja Inventarisasi.
- (4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.
- (5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data administrasi.
- (6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan data administrasi).
- (7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan).
- (8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.
- (9) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi.
- (10) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak Ditemukan", maka pengisian form tidak perlu dilanjutkan.
- (11) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data administrasi dengan data hasil cek fisik.
Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada, centang kolom sama pada angka (12) s.d angka (15) selanjutnya isi angka (16) dan seterusnya.
Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan (kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. angka (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
- (12) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (13) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (14) Diisi dengan merek/tipe/keterangan sesuai fisik BMN yang ada.
- (15) Diisi dengan tanggal perolehan/tanggal dibangun sesuai dengan data menurut hasil cek fisik.
- (16) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan perbaikan apabila pernah dilakukan perbaikan.
- (17) Diisi dengan kondisi Jembatan lain, jika:
 1. Baik Sekali:
Jembatan dalam keadaan baru, tanpa kerusakan, elemen jembatan berada dalam kondisi baik.
 2. Baik:
Kerusakan sangat sedikit (dapat diperbaiki dengan pemeliharaan rutin dan tidak berdampak pada keamanan atau fungsi jembatan).
Contoh: *Scour* sedikit, karat pada permukaan, papan kayu longgar.

3. Sedang:

Kerusakan yang memerlukan pemantauan dan pemeliharaan pada masa yang akan datang. Contoh: pembusukan sedikit pada struktur kayu, penurunan mutu pada elemen pasangan batu, penumpukan sampah atau tanah di sekitar perletakan, kesemuanya merupakan tanda-tanda yang membutuhkan penggantian.

4. Jelek:

Kerusakan yang membutuhkan perhatian (kerusakan yang mungkin serius dalam 12 bulan). Contoh: struktur beton sedikit retak, kayu yang membusuk, lubang pada permukaan lantai kendaraan dan pada kepala jembatan, *scouring* dalam jumlah sedang pada pilar/kepala jembatan, rangka sudah mulai berkarat.

5. Jelek Sekali:

Kondisi kritis; (kerusakan serius yang membutuhkan penanganan segera). Contoh: kegagalan rangka, keretakan beton yang memiliki tulangan yang terlihat dan berkarat, sandaran pegangan/pagar pengaman tidak ada. Elemen runtuh atau tidak berfungsi lagi. Contoh bangunan atas yang runtuh, timbunan tanah yang hanyut.

Diisi dengan kondisi Jalan lain, jika:

1. Sangat Baik:

Umumnya tidak retak, hanya sedikit deformasi pada jalur roda.

2. Baik:

Terlihat adanya retak halus, sedikit deformasi pada jalur roda namun masih tetap stabil.

3. Sedang:

Terlihat adanya retak sedang, terdapat beberapa deformasi pada jalur roda, pada dasarnya masih menunjukkan kestabilan.

4. Jelek:

Retak banyak, demikian juga deformasi pada jalur roda, menunjukkan gejala ketidakstabilan.

5. Jelek Sekali:

Retak merata dan banyak berlubang, sebagian besar mengalami deformasi dan tidak stabil.

(18) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor lokasi BMN berada.

(19) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa lokasi BMN berada.

(20) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi BMN berada.

(21) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya lokasi BMN berada.

(22) Diisi dengan nama Provinsi lokasi BMN berada.

(23) Diisi dengan status pengelolaan BMN, apakah sudah ada persetujuan Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusan namun belum ditetapkan SK Penghapusan.

(24) Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah tempat jalan lain berdiri. Sendiri, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik satker bersangkutan, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker pada angka (25), kode pencatatan tanah pada angka (26) beserta NUP pada angka (27).

Satker Lain, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik satker lain baik pada K/L yang sama maupun K/L lain, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker tersebut pada angka (25), kode pencatatan tanah pada angka (26) beserta NUP pada angka (27).

Pemda, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik Pemerintah Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah dengan Pemda yang bersangkutan guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu mengisi angka (25), angka (26), dan angka (27).

Pihak Lain, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada bukan merupakan milik Pemerintah Pusat/Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebut, guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut.

- (25) Diisi kode satker yang menguasai tanah tempat BMN tersebut berdiri.
- (26) Diisi kode barang tanah tempat BMN tersebut berdiri.
- (27) Diisi NUP tanah tempat BMN tersebut berdiri.
- (28) Diisi data BMN untuk input proses Penilaian, dengan mencentang pilihan BMN sebagai landasan pacu atau sebagai Jembatan Labuh/Sandar.
- (29) Diisi luas *Runway* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (30) Diisi luas *Overrun* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (31) Diisi luas *Turning Area* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (32) Diisi luas *Runway Shoulder* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (33) Diisi luas *Exit Taxiway* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (34) Diisi luas *Rapid Exit Taxiway* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (35) Diisi luas *Parallel Taxiway* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (36) Diisi luas *Taxiway Shoulder* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (37) Diisi luas *Apron* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (38) Diisi luas *Apron Helipad* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (39) Diisi luas *Taxiway Helipad* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (40) Diisi luas *Holdring Bay* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (41) Diisi luas *Clearway* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (42) Diisi luas *RESA* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (43) Diisi luas *Runway Strip* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (44) Diisi luas *Marking* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (45) Diisi luas *Jetty* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (46) Diisi luas *Causeway* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (47) Diisi dengan keterangan lain mengenai identitas jalan atau jembatan.
- (48) Diisi dengan mencentang kotak status penggunaan BMN yang sesuai kondisi terkini.
- (49) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tuis satker.
- (50) Diisi keterangan tambahan pada angka (49), seperti Persetujuan PSP, dan lain sebagainya.
- (51) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dan lain sebagainya) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (52) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (51), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan, besaran PNBK, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya.
- (53) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dan lain sebagainya) yang belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (54) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (53).
- (55) Diisi luas BMN yang digunakan oleh satker/KL lain atau pihak lain.
- (56) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana tercantum pada angka (55).

- (57) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudah ada rencana untuk menggunakan BMN tersebut.
- (58) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (57).
- (59) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan/pemanfaatan.
- (60) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (59).
- (61) Diisi total luas penggunaan BMN.
- (62) Diisi dengan keterangan pihak yang sedang memanfaatkan BMN tersebut.
- (63) Diisi dengan foto BMN.
- (64) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada.
- (65) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.
- (66) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.
- (67) Diisi dengan NIP/NRP petugas pendataan BMN.

Form - 03.d

|  | | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA | FORM - 03.d BENDUNGAN |
|---|--|--|---|
| FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI | | | |
| 1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang | | | No Urut: (3) |
| Nama UAKPB |(1)..... | | |
| Kode UAKPB |(2)..... | | |
| 2. Data Administrasi BMN | | | |
| Kode Barang |(4)..... | NUP |(5)..... |
| Nama Barang |(6)..... | | |
| Merk/Type/Keterangan |(7)..... | | |
| Tanggal Perolehan |(8)..... | | |
| Kondisi | (9) <input type="checkbox"/> Baik | <input type="checkbox"/> Rusak Ringan | <input type="checkbox"/> Rusak Berat |
| 3. Data BMN Inventarisasi | | | |
| Fisik Barang | (10) <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ditemukan | |
| Kesesuaian dengan | (11) <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai | <input type="checkbox"/> Belum tercatat / Barang Berlebih |
| Kode Barang | <input type="checkbox"/> Sama | <input type="checkbox"/> Tidak sama,(12)..... | |
| Nama Barang | <input type="checkbox"/> Sama | <input type="checkbox"/> Tidak sama,(13)..... | |
| Merk/Type/Keterangan | <input type="checkbox"/> Sama | <input type="checkbox"/> Tidak sama,(14)..... | |
| Tanggal Perolehan/Bangun | <input type="checkbox"/> Sama | <input type="checkbox"/> Tidak sama,(15)..... | Tahun Perbaikan(16)..... |
| Luas Bangunan |(17)..... m ² | | |
| Kondisi | (18) <input type="checkbox"/> Baik Sekali <input type="checkbox"/> Baik | <input type="checkbox"/> Rusak Ringan Sedang | <input type="checkbox"/> Rusak Berat Jelek <input type="checkbox"/> Jelek Sekali |
| Alamat Objek |(19)..... | | |
| | Kel./Desa:(20)..... | Kab./Kota:(22)..... | |
| | Kec.:(21)..... | Provinsi:(23)..... | |
| Status Pengelolaan | (24) <input type="checkbox"/> Telah terbit persetujuan pemindahtanganan/penghapusan tetapi belum terbit SK Penghapusan <input type="checkbox"/> Belum terbit persetujuan pemindahtanganan/penghapusan | | |
| 4. Informasi Tanah Lokasi Bendungan | | | |
| Pemilik Tanah | (25) <input type="checkbox"/> Sendiri | <input type="checkbox"/> Satker Lain | <input type="checkbox"/> Pihak Lain |
| Kode Satker |(26)..... | | |
| Kode Barang |(27)..... | | |
| NUP |(28)..... | | |
| 5. Data Penilaian | | | |
| a. Bangunan Utama | | | |
| Jenis Bendungan | (29) <input type="checkbox"/> Urugan Tanah | <input type="checkbox"/> Urugan Batu | |
| 1. Bendungan Utama | | | |
| Treatment pondasi | (30) <input type="checkbox"/> Curtain Grouting | <input type="checkbox"/> Consolidation Grouting | <input type="checkbox"/> Blanket Grouting |
| | <input type="checkbox"/> Diaphragm Wall | <input type="checkbox"/> Cut of Wall | |
| Volume inti | lebar puncak(31)..... m | tinggi(32)..... m | panjang(33)..... m |
| 2. Bendungan Pengelak | | | |
| Volume inti | lebar puncak(34)..... m | tinggi(35)..... m | panjang(36)..... m |
| b. Bangunan Pelengkap | | | |
| 1. Saluran/Terowongan Pengelak | | | |
| Treatment pondasi | (37) <input type="checkbox"/> Curtain Grouting | <input type="checkbox"/> Consolidation Grouting | <input type="checkbox"/> Blanket Grouting |
| Panjang |(38)..... m | | |
| 2. Galeri/Terowongan Inspeksi | | | |
| Treatment pondasi | (39) <input type="checkbox"/> Curtain Grouting | <input type="checkbox"/> Consolidation Grouting | <input type="checkbox"/> Blanket Grouting |
| Panjang |(40)..... m | | |
| 3. Bangunan Pelimpah dan Kolam Olak | | | |
| Treatment pondasi | (41) <input type="checkbox"/> Curtain Grouting | <input type="checkbox"/> Consolidation Grouting | <input type="checkbox"/> Blanket Grouting |
| Luas saluran |(42)..... m ² | | |
| 4. Bangunan Pengambilan/Intake | | | |
| Volume Konstruksi |(43)..... m ³ | | |
| 5. Bangunan Penguras/Bottom Outlet | | | |
| Volume Konstruksi |(44)..... m ³ | | |
| c. Pekerjaan Hidromekanikal Pintu | | | |
| Luas pintu | Gate Leaf(45)..... m ² | Guide Frame(46)..... m ² | Holst & Contr(47)..... set |
| d. Penahan Tanah | | | |
| Luas Dinding Penahan Tanah |(48)..... m ² | | |
| Keterangan Lain-lain |(49)..... | | |

-2-

6. Data Pengelolaan BMN
Status Penggunaan: (50)

| Uraian | Luas (m ²) | Keterangan |
|---|------------------------|------------|
| Digunakan sendiri | ..(51).. | ..(52).. |
| Dilakukan pemanfaatan | | |
| a. Sesuai persetujuan Menteri Keuangan | ..(53).. | ..(54).. |
| b. Belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan | ..(55).. | ..(56).. |
| Digunakan oleh satker K/L lain atau dioperasikan pihak lain | ..(57).. | ..(58).. |
| Belum digunakan (ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan) | ..(59).. | ..(60).. |
| Tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan | ..(61).. | ..(62).. |
| Total | ..(63).. | |

Pihak Lain yang memanfaatkan:
..(64)..

7. Foto BMN ..(65)..

8. Keterangan Tambahan
..(66)..

Tanggal Pelaksanaan Pendataan: ..(67).. _____

Petugas Pendataan
..(68)..
..(69).. _____

PETUNJUK PENGISIAN FORM – 03.d

a. Penjelasan Umum

Form 03.d - Bendungan adalah Formulir yang digunakan untuk mendata dan mencatat informasi terkait dengan BMN berupa Bendungan yang tercatat dan/atau ditemukan dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Form ini digunakan sebagai bahan pembentukan nilai hasil Penilaian.

b. Cara Pengisian

- (1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
- (2) Diisi dengan kode UAKPB.
- (3) Diisi dengan nomor urut dalam Kertas Kerja Inventarisasi.
- (4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.
- (5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data administrasi.
- (6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan data administrasi).
- (7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan).
- (8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.
- (9) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi.
- (10) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak Ditemukan", maka pengisian form tidak perlu dilanjutkan.
- (11) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data administrasi dengan data hasil cek fisik.
 Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada, centang kolom sama pada angka (12) s.d angka (15), selanjutnya isi angka (16) dan seterusnya.
 Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan (kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
 Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. angka (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
- (12) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (13) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (14) Diisi dengan merek/tipe/keterangan sesuai fisik BMN yang ada.
- (15) Diisi dengan tanggal perolehan/dibangun sesuai dengan data menurut hasil cek fisik.
- (16) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan perbaikan apabila pernah dilakukan perbaikan.
- (17) Diisi dengan luas BMN saat pendataan.
- (18) Diisi dengan kondisi BMN saat pendataan.
- (19) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor lokasi tanah berada.
- (20) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa lokasi tanah berada.
- (21) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi tanah berada.
- (22) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya lokasi tanah berada.
- (23) Diisi dengan nama Provinsi lokasi tanah berada.
- (24) Diisi dengan status pengelolaan BMN apakah sudah ada persetujuan Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusan

namun belum ditetapkan SK Penghapusan.

- (25) Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah tempat jalan lain berdiri. Sendiri, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik satker bersangkutan, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker pada angka (26), kode pencatatan tanah pada angka (27) beserta NUP pada angka (28).
Satker Lain, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik satker lain baik pada K/L yang sama atau K/L lain, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker tersebut pada angka (26), kode pencatatan tanah pada angka (27) beserta NUP pada angka (28).
Pemda, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik Pemerintah Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah dengan Pemda yang bersangkutan guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu mengisi angka (26), angka (27), dan angka (28).
Pihak Lain, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada bukan merupakan milik Pemerintah Pusat/Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebut, guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut.
- (26) Diisi kode satker yang menguasai tanah tempat BMN tersebut berdiri.
(27) Diisi kode barang tanah tempat BMN tersebut berdiri.
(28) Diisi NUP tanah tempat BMN tersebut berdiri.
(29) Diisi jenis bendungan.
(30) Diisi jenis *Treatment* pondasi bendungan utama.
(31) Diisi lebar puncak bendungan utama.
(32) Diisi tinggi bendungan utama.
(33) Diisi panjang bendungan utama.
(34) Diisi lebar puncak bendungan pengelak.
(35) Diisi tinggi bendungan pengelak.
(36) Diisi panjang bendungan pengelak.
(37) Diisi jenis *Treatment* pondasi Saluran/Terowongan Pengelak.
(38) Diisi panjang *Treatment* pondasi Saluran/Terowongan Pengelak.
(39) Diisi jenis *Treatment* pondasi Galeri/Terowongan Inspeksi.
(40) Diisi panjang *Treatment* pondasi Galeri/Terowongan Inspeksi.
(41) Diisi jenis *Treatment* pondasi Bangunan Pelimpah dan Kolam Olak.
(42) Diisi luas saluran peluncur Bangunan Pelimpah dan Kolam Olak.
(43) Diisi Volume Beton *Intake*/Bangunan pengambilan.
(44) Diisi Volume Beton Bangunan Penguras/ *Bottom Outlet*.
(45) Diisi luas pintu *Gate Leaf*.
(46) Diisi luas pintu *Guide Frame*.
(47) Diisi unit pintu *Hoist & Control*.
(48) Diisi luas Dinding Penahan Tanah.
(49) Diisi dengan keterangan lain mengenai identitas bangunan, seperti: nama objek sesuai penggunaannya.
(50) Diisi dengan mencentang status penggunaan BMN tersebut sesuai kondisi terkini.
(51) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tuis satker.
(52) Diisi keterangan tambahan pada angka (51), seperti Persetujuan PSP, dsb.
(53) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dan lain sebagainya) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
(54) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (53), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan,

- besaran PNBPN, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya.
- (55) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dan lain sebagainya yang belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
 - (56) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (55).
 - (57) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain atau pihak lain.
 - (58) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana tercantum pada angka (57), seperti persetujuan penggunaan sementara atau persetujuan pengoperasionalan oleh pihak lain untuk penyelenggaraan tugas satker oleh Menteri Keuangan.
 - (59) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudah ada rencana untuk menggunakan BMN tersebut.
 - (60) Diisi keterangan untuk luas pada angka (59).
 - (61) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan/pemanfaatan.
 - (62) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (61).
 - (63) Diisi total luas penggunaan BMN.
 - (64) Diisi dengan pihak yang sedang memanfaatkan/menggunakan seperti satker lain/pihak lain (mitra kerjasama pemanfaatan BMN).
 - (65) Diisi dengan foto BMN.
 - (66) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada.
 - (67) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.
 - (68) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.
 - (69) Diisi dengan NIP/NRP petugas pendataan BMN.

Form - 03.e

|  | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA | FORM - 03.e BENDUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|----------------|--|---------------------------------|--|---|--|----------------|--|----------------------------|---|--|----------------|--|-------------|---|--|----------------|--|------------------|---|--|----------------|--|---|---|--|----------------|--|--|---|--|----------------|--|------------|---|--|----------------|--|----------------------------------|---|--|----------------|--|-------------------------------|---|--|----------------|--|---------------------|------------------|----------------|--|----------------|--------------------------------|------------------|----------------|--|----------------|
| FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang | | No Urut: (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama UAKPB | :(1)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode UAKPB | :(2)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Data Administrasi BMN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Barang | :(4)..... | NUP(5)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Barang | :(6)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Merk/Type/Keterangan | :(7)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Perolehan | :(8)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kondisi (9) | <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Data BMN Inventarisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fisik Barang (10) | <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ditemukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesesuaian dengan Kode Barang (11) | <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai <input type="checkbox"/> Belum tercatat / Barang Berlebih | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Barang | <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama,(12)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Barang | <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama,(13)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Merk/Type/Keterangan | <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama,(14)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Perolehan/Bangun | <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama,(15)..... | Tatun Perbaikan :(16)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luas Bangunan | :(17)..... m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kondisi (18) | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Baik</td> <td style="text-align: center;">Rusak Ringan</td> <td style="text-align: center;">Rusak Berat</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Baik Sekali <input type="checkbox"/> Baik</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Sedang</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Jelek <input type="checkbox"/> Jelek Sekali</td> </tr> </table> | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | <input type="checkbox"/> Baik Sekali <input type="checkbox"/> Baik | <input type="checkbox"/> Sedang | <input type="checkbox"/> Jelek <input type="checkbox"/> Jelek Sekali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Baik Sekali <input type="checkbox"/> Baik | <input type="checkbox"/> Sedang | <input type="checkbox"/> Jelek <input type="checkbox"/> Jelek Sekali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alamat Objek | :(19)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kel./Desa:(20)..... Kab./Kota:(22)..... Kec.:(21)..... Provinsi:(23)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Status Pengelolaan (24) | <input type="checkbox"/> Telah terbit persetujuan pemindahtanganan/penghapusan tetapi belum ada SK Penghapusan <input type="checkbox"/> Belum terbit persetujuan pemindahtanganan/penghapusan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Informasi Tanah Lokasi Bendung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemilik Tanah (25) | <input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Satker Lain <input type="checkbox"/> Pihak Lain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Satker | :(26)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Barang | :(27)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUP | :(28)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Data Penilaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bangunan Utama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipe Bendung (29) | <input type="checkbox"/> Bendung Tetap <input type="checkbox"/> Bendung Gerak <input type="checkbox"/> Bendung Karet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tubuh Bendung | : Volume(30)..... m ³ Panjang Mercu(31)..... m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Bangunan Pelengkap</th> <th>Tinggi (m)</th> <th>Lebar (m)</th> <th>Volume (m³)</th> <th>Jumlah (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Lantai Hulu</td> <td>:</td> <td></td> <td>.....(32).....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Lantai Hilir/Kolam Olak</td> <td>:</td> <td></td> <td>.....(33).....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. Sandtrap</td> <td>:</td> <td></td> <td>.....(34).....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d. Sayap Bendung</td> <td>:</td> <td></td> <td>.....(35).....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>e. Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu Kali</td> <td>:</td> <td></td> <td>.....(36).....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>f. Dinding Penahan Tanah Pasangan Bronjong</td> <td>:</td> <td></td> <td>.....(37).....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>g. Tanggul</td> <td>:</td> <td></td> <td>.....(38).....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>h. Bangunan Pengambilan / Intake</td> <td>:</td> <td></td> <td>.....(39).....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>i. Bangunan Pembilas/Penguras</td> <td>:</td> <td></td> <td>.....(40).....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>j. Pintu Air Intake</td> <td>:(41).....</td> <td>.....(42).....</td> <td></td> <td>.....(43).....</td> </tr> <tr> <td>k. Pintu Air Pembilas/Penguras</td> <td>:(44).....</td> <td>.....(45).....</td> <td></td> <td>.....(46).....</td> </tr> </tbody> </table> | | Bangunan Pelengkap | Tinggi (m) | Lebar (m) | Volume (m ³) | Jumlah (set) | a. Lantai Hulu | : | |(32)..... | | b. Lantai Hilir/Kolam Olak | : | |(33)..... | | c. Sandtrap | : | |(34)..... | | d. Sayap Bendung | : | |(35)..... | | e. Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu Kali | : | |(36)..... | | f. Dinding Penahan Tanah Pasangan Bronjong | : | |(37)..... | | g. Tanggul | : | |(38)..... | | h. Bangunan Pengambilan / Intake | : | |(39)..... | | i. Bangunan Pembilas/Penguras | : | |(40)..... | | j. Pintu Air Intake | :(41)..... |(42)..... | |(43)..... | k. Pintu Air Pembilas/Penguras | :(44)..... |(45)..... | |(46)..... |
| Bangunan Pelengkap | Tinggi (m) | Lebar (m) | Volume (m ³) | Jumlah (set) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Lantai Hulu | : | |(32)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Lantai Hilir/Kolam Olak | : | |(33)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Sandtrap | : | |(34)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. Sayap Bendung | : | |(35)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e. Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu Kali | : | |(36)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f. Dinding Penahan Tanah Pasangan Bronjong | : | |(37)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g. Tanggul | : | |(38)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h. Bangunan Pengambilan / Intake | : | |(39)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i. Bangunan Pembilas/Penguras | : | |(40)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| j. Pintu Air Intake | :(41)..... |(42)..... | |(43)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| k. Pintu Air Pembilas/Penguras | :(44)..... |(45)..... | |(46)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan Lain-lain :(47)..... _____ _____ _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-2-

6. Data Pengelolaan BMN
Status Penggunaan (48)

| Uraian | Luas (m ²) | Keterangan |
|---|------------------------|------------|
| Digunakan sendiri | ..(49).. | ..(50).. |
| Dilakukan pemanfaatan | | |
| a. Sesuai persetujuan Menteri Keuangan | ..(51).. | ..(52).. |
| b. Belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan | ..(53).. | ..(54).. |
| Digunakan oleh satker KL lain atau dioperasikan pihak lain | ..(55).. | ..(56).. |
| Belum digunakan (ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan) | ..(57).. | ..(58).. |
| Tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan | ..(59).. | ..(60).. |
| Total | ..(61).. | |

Pihak Lain yang memanfaatkan:
..(62)..

7. Foto BMN (63)

8. Keterangan Tambahan
..(64)..

Tanggal Pelaksanaan Pendataan ..(65)_____

Petugas Pendataan
..(66)..
..(67)_____

PETUNJUK PENGISIAN FORM - 03.e

a. Penjelasan Umum

Form 03.e - Bendung adalah Formulir yang digunakan untuk mendata dan mencatat informasi terkait dengan BMN berupa Bendungan yang tercatat dan/atau ditemukan dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Form ini digunakan sebagai bahan pembentukan nilai dalam proses Penilaian.

b. Cara Pengisian

- (1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
- (2) Diisi dengan kode UAKPB.
- (3) Diisi dengan nomor urut dalam Kertas Kerja Inventarisasi.
- (4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.
- (5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data administrasi.
- (6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan data administrasi).
- (7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan).
- (8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.
- (9) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi.
- (10) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak Ditemukan", maka pengisian form tidak perlu dilanjutkan.
- (11) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data administrasi dengan data hasil cek fisik.
 Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada, centang kolom sama pada angka (12) s.d angka (15), selanjutnya isi angka (16) dan seterusnya.
 Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan (kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
 Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. angka (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
- (12) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (13) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (14) Diisi dengan merek/tipe/keterangan sesuai fisik BMN yang ada.
- (15) Diisi dengan tanggal perolehan/tanggal dibangun sesuai dengan data menurut hasil cek fisik.
- (16) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan perbaikan apabila pernah dilakukan perbaikan.
- (17) Diisi dengan luas BMN saat pendataan.
- (18) Diisi dengan kondisi BMN saat pendataan.
- (19) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor lokasi tanah berada.
- (20) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa lokasi tanah berada.
- (21) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi tanah berada.
- (22) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya lokasi tanah berada.
- (23) Diisi dengan nama Provinsi lokasi tanah berada.
- (24) Diisi dengan status pengelolaan BMN apakah sudah ada persetujuan Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusan

namun belum ditetapkan SK Penghapusan.

- (25) Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah tempat jalan lain berdiri. Sendiri, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik satker bersangkutan, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker pada angka (26), kode pencatatan tanah pada angka (27) beserta NUP pada angka (28).
Satker Lain, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik satker lain baik pada K/L yang sama atau K/L lain, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker tersebut pada angka (26), kode pencatatan tanah pada angka (27) beserta NUP pada angka (28).
Pemda, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik Pemerintah Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah dengan Pemda yang bersangkutan guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu mengisi angka (26), angka (27), dan angka (28).
Pihak Lain, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada bukan merupakan milik Pemerintah Pusat/Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebut, guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut.
- (29) Diisi dengan mencentang tipe bendung (bendung tetap, bendung gerak, atau bendung karet).
- (30) Diisi dengan volume bendung (dalam m³ atau kubik).
- (31) Diisi dengan panjang mercu.
- (32) Diisi dengan volume lantai hulu (dalam m³ atau meter kubik).
- (33) Diisi dengan volume lantai hilir/kolam olak (dalam m³ atau meter kubik).
- (34) Diisi dengan volume *sandtrap* (dalam m³ atau meter kubik).
- (35) Diisi dengan volume sayap bendung (dalam m³ atau meter kubik).
- (36) Diisi dengan volume dinding penahan tanah pasangan batu kali (dalam m³ atau meter kubik).
- (37) Diisi dengan volume dinding penahan tanah pasangan bronjong (dalam m³ atau meter kubik).
- (38) Diisi dengan volume tanggul (dalam m³ atau meter kubik).
- (39) Diisi dengan volume bangunan pengambilan/Intake (dalam m³ atau meter kubik).
- (40) Diisi dengan volume bangunan pembilas/penguras (dalam m³ atau meter kubik).
- (41) Diisi dengan tinggi pintu air *Intake*.
- (42) Diisi dengan lebar pintu air *Intake*.
- (43) Diisi dengan jumlah unit pintu air *Intake*.
- (44) Diisi dengan tinggi pintu air Pembilas/Penguras (dalam ukuran meter).
- (45) Diisi dengan lebar pintu air Pembilas/Penguras.
- (46) Diisi dengan jumlah unit pintu air Pembilas/Penguras.
- (47) Diisi dengan keterangan lain mengenai identitas bendung, seperti: nama objek sesuai penggunaannya.
- (48) Diisi dengan mencentang status penggunaan BMN tersebut sesuai kondisi terkini.
- (49) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tuis satker.
- (50) Diisi keterangan tambahan pada angka (49), seperti Persetujuan PSP, dsb.
- (51) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (52) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (51), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan,

besaran PNBPN, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya.

- (53) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (54) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (53).
- (55) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain atau pihak lain.
- (56) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana tercantum pada angka (55), seperti persetujuan penggunaan sementara atau persetujuan pengoperasian oleh pihak lain untuk penyelenggaraan tugas satker oleh Menteri Keuangan.
- (57) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudah ada rencana untuk menggunakan BMN tersebut.
- (58) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (58).
- (59) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan/pemanfaatan.
- (60) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (59).
- (61) Diisi total luas penggunaan BMN.
- (62) Diisi dengan pihak yang sedang memanfaatkan/menggunakan seperti satker lain/pihak lain (mitra kerjasama pemanfaatan BMN).
- (63) Diisi dengan foto BMN, menggambarkan kondisi BMN terkini, termasuk mewakili tampak luar dan tampak dalam bangunan.
- (64) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada.
- (65) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.
- (66) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.
- (67) Diisi dengan NIP/NRP petugas pendataan BMN.

Form - 03.f

| | | |
|--|---|---|
|  | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA | FORM - 03.f BANGUNAN AIR LAINNYA |
| FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI | | |
| 1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang | | No Urut: (3) |
| Nama UAKPB | (1) | |
| Kode UAKPB | (2) | |
| 2. Data Administrasi BMN | | |
| Kode Barang | (4) | NUP (5) |
| Nama Barang | (6) | |
| Merk/Type/Keterangan | (7) | |
| Tanggal Perolehan | (8) | |
| Kondisi (9) | <input type="checkbox"/> Baik | <input type="checkbox"/> Rusak Ringan |
| | | <input type="checkbox"/> Rusak Berat |
| 3. Data BMN Inventarisasi | | |
| Fisik Barang (10) | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ditemukan |
| Kesesuaian dengan Kode Barang (11) | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| | | <input type="checkbox"/> Belum tercatat / Barang Berlebih |
| Kode Barang | <input type="checkbox"/> Sama | <input type="checkbox"/> Tidak sama (12) |
| Nama Barang | <input type="checkbox"/> Sama | <input type="checkbox"/> Tidak sama (13) |
| Merk/Type/Keterangan | <input type="checkbox"/> Sama | <input type="checkbox"/> Tidak sama (14) |
| Tanggal Perolehan/Bangun (17) | <input type="checkbox"/> Sama | <input type="checkbox"/> Tidak sama (15) |
| Kondisi (17) | <input type="checkbox"/> Baik | <input type="checkbox"/> Rusak Ringan |
| | <input type="checkbox"/> Baik Sekali | <input type="checkbox"/> Sedang |
| | <input type="checkbox"/> Baik | <input type="checkbox"/> Rusak Berat |
| | | <input type="checkbox"/> Jelek |
| | | <input type="checkbox"/> Jelek Sekali |
| Alamat/Objek (18) | | |
| | Kel./Desa (19) | Kab./Kota (21) |
| | Kec (20) | Provinsi (22) |
| Status Perigelolehan (23) | <input type="checkbox"/> Telah terbit; persetujuan pemindahtanganan/penghapusan; tetapi belum terbit SK Penghapusan | |
| | <input type="checkbox"/> Belum terbit; persetujuan pemindahtanganan/penghapusan | |
| 4. Informasi/Tanah/Lokasi/Bangunan Air Lainnya | | |
| Pemilik Tanah (24) | <input type="checkbox"/> Sendiri | <input type="checkbox"/> Satker Lain |
| | | <input type="checkbox"/> Pihak Lain |
| Kode Satker (25) | | |
| Kode Barang (26) | | |
| NUP (27) | | |
| Kondisi Tanah (28) | <input type="checkbox"/> Baik | <input type="checkbox"/> Rusak Ringan |
| | | <input type="checkbox"/> Rusak Berat |
| 5. Data Penilaian | | |
| Berdasarkan Kemiripan Konstruksinya dapat digolongkan sebagai - (pilih salah satu) | | |
| <input type="checkbox"/> 1 Gedung dan Bangunan | | |
| a. Jenis Bangunan Berdasarkan Fungsi (29) | | |
| <input type="checkbox"/> Residensial | <input type="checkbox"/> Komersial | <input type="checkbox"/> Industrial |
| <input type="checkbox"/> Lain-Lain | | |
| <input type="checkbox"/> Rumah Tinggal / Dinas | <input type="checkbox"/> Ruko/Rukan | <input type="checkbox"/> Pabrik |
| <input type="checkbox"/> Rumah Susun | <input type="checkbox"/> Perkantoran | <input type="checkbox"/> Gudang |
| <input type="checkbox"/> Mess/Asrama | <input type="checkbox"/> Pertokoan | <input type="checkbox"/> Bengkel |
| <input type="checkbox"/> Apartemen | <input type="checkbox"/> Mall/Trade Center | <input type="checkbox"/> Mezzanine |
| <input type="checkbox"/> Kondominium | <input type="checkbox"/> Kantor Pememntah | <input type="checkbox"/> Ada |
| | | <input type="checkbox"/> Tidak Ada |
| <input type="checkbox"/> Sekotah | | |
| <input type="checkbox"/> Tempat ibadah | | |
| <input type="checkbox"/> Gedung Pertemuan | | |
| <input type="checkbox"/> Rumah Sakit | | |
| <input type="checkbox"/> Hotel | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| b. Fasilitas | | |
| Pagar | Jenis: (30) | Panjang: (31) m |
| Perkerasan | Jenis: (32) | Luas: (33) m ² |
| <input type="checkbox"/> 2 Jembatan | | |
| Kondisi Tanah (34) | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| | | <input type="checkbox"/> 3 |
| Detail Posisi Jembatan (35) | | |
| Jenis Jembatan (36) | <input type="checkbox"/> Box Culvert | <input type="checkbox"/> Beton Flat Slab |
| | <input type="checkbox"/> Geragai Baja | <input type="checkbox"/> Rangka Baja |
| | | <input type="checkbox"/> Beton Balok T |
| | | <input type="checkbox"/> Beton Prategang |
| | | <input type="checkbox"/> Lainnya (37) |
| Panjang Jembatan (38) | m | Tinggi Pilar (41) m |
| Lebar Jembatan (39) | m | Lebar Trotoar (42) m |
| Luas Jembatan (40) | m ² | Jumlah Tumpuan (43) |
| Perkerasan | Lebar (46) | Panjang Jemb (44) m |
| | Panjang (47) m | Posisi Jembatan (45) |
| | Lebar (48) m | <input type="checkbox"/> Berada di atas Sungai |
| | | <input type="checkbox"/> Tidak Berada di atas Sungai |
| Sambungan | Jumlah (49) | Panjang (50) m |
| Sandaran | Bahan (51) | Panjang (52) m |
| Tiang Sandaran | Bahan (53) | Jumlah (54) |

-2-

3. Saluran

Jenis (55) : Saluran Terbuka Saluran Tertutup

Bahan (56) : Tanah Batu Bata Batu Kali Beton

Dimensi : Luas Penampang ..(57).. m² Panjang Saluran ..(58).. m

4. Pengaman Sungai / Pantai

Jenis (58) : Penguat Tebing Revetment Groin Breakwater.

Dimensi : Volume Konstruksi ..(60).. m³

5. Bak Penampungan/ Reservoir

Dimensi : Panjang ..(61).. m Lebar ..(62).. m Tinggi ..(63).. m

6. Lainnya (64)

Jenis Konstruksi (65) Volume Konstruksi ..(66).. m³

Konstruksi Tanah Konstruksi Beton

Konstruksi Batu Bata Konstruksi Beton Bertulang

Konstruksi Batu Kali Konstruksi Baja

Keterangan Lain-lain : ..(67)..

6. Data Pengelolaan BMN (68)

Status Penggunaan (68)

| Uraian | Luas (m ²) | Keterangan |
|--|------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Digunakan sendiri | <u>..(69)..</u> | <u>..(70)..</u> |
| <input type="checkbox"/> Dilakukan pemanfaatan | | |
| a. Sesuai persetujuan Menteri Keuangan | <u>..(71)..</u> | <u>..(72)..</u> |
| b. Belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan | <u>..(73)..</u> | <u>..(74)..</u> |
| <input type="checkbox"/> Digunakan oleh satker K/L lain atau dioperasikan pihak lain | <u>..(75)..</u> | <u>..(76)..</u> |
| <input type="checkbox"/> Belum digunakan (ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan) | <u>..(77)..</u> | <u>..(78)..</u> |
| <input type="checkbox"/> Tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan | <u>..(79)..</u> | <u>..(80)..</u> |
| Total | <u>..(81)..</u> | |

Pihak Lain yang memanfaatkan:
..(82)..

7. Foto BMN (83)

8. Keterangan Tambahan
..(84)..

Tanggal Pelaksanaan Pendataan ..(85)..

Petugas Pendataan:

..(86)..

..(87)..

PETUNJUK PENGISIAN FORM - 03.f

a. Penjelasan Umum

Form 03.f - Bangunan Air Lainnya adalah Formulir yang digunakan untuk mendata dan mencatat informasi terkait dengan BMN berupa Bangunan Air selain Bendungan dan Bendung (seperti saluran air, pengaman sungai/pantai, bak penampungan, dan lain sebagainya) yang tercatat dan/atau ditemukan. Form ini digunakan sebagai bahan pembentukan nilai wajar dalam proses Penilaian.

b. Cara Pengisian

- (1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
- (2) Diisi dengan kode UAKPB.
- (3) Diisi dengan nomor urut dalam Kertas Kerja Inventarisasi.
- (4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.
- (5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data administrasi.
- (6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan data administrasi).
- (7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan).
- (8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.
- (9) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi.
- (10) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak Ditemukan", maka pengisian Form tidak perlu dilanjutkan.
- (11) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data administrasi dengan data hasil cek fisik.
Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada, centang kolom sama pada angka (12) s.d angka (15) selanjutnya isi angka (16) dan seterusnya.
Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan (kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. angka (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
- (12) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (13) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (14) Diisi dengan merek/tipe/keterangan sesuai fisik BMN yang ada.
- (15) Diisi dengan tanggal perolehan/tanggal dibangun sesuai dengan hasil cek fisik.
- (16) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan perbaikan apabila pernah dilakukan perbaikan.
- (17) Diisi dengan kondisi BMN saat pendataan.
- (18) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor lokasi tanah berada.
- (19) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa lokasi tanah berada.
- (20) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi tanah berada.
- (21) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya lokasi tanah berada.
- (22) Diisi dengan nama Provinsi lokasi tanah berada.

- (23) Diisi dengan status pengelolaan BMN apakah sudah ada persetujuan Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusan namun belum ditetapkan SK Penghapusan.
- (24) Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah tempat jalan lain berdiri. Sendiri, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik satker bersangkutan, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker pada angka (25), kode pencatatan tanah pada angka (26) beserta NUP pada angka (27).
Satker Lain, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik satker lain baik pada K/L yang sama atau K/L lain, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker tersebut pada angka (25), kode pencatatan tanah pada angka (26) beserta NUP pada angka (27).
Pemda, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik Pemerintah Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah dengan Pemda yang bersangkutan guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu mengisi angka (25), (26), dan (27)
Pihak Lain, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada bukan merupakan milik Pemerintah Pusat/Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebut, guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut.
- (28) Diisi dengan kondisi tanah tempat bangunan air lainnya berdiri.
- (29) Diisi dengan mencentang pilihan Jenis Bangunan berdasarkan fungsi apakah termasuk dalam katagori bangunan Residensial, Komersial, Industrial, dan/atau lain-lain.
- (30) Diisi hanya apabila terdapat fasilitas berupa pagar permanen, jika tidak ada, maka tidak perlu diisi.
- (31) Diisi panjang pagar sebagaimana tercantum pada angka (30).
- (32) Diisi hanya apabila terdapat fasilitas berupa perkerasan (berupa aspal, beton, batako, dsb), jika tidak ada, maka tidak perlu diisi.
- (33) Diisi luas perkerasan sebagaimana tercantum pada angka (32).
- (34) Diisi dengan kondisi tanah.
1: Bila tanah asli keras padat
2: Bila tanah asli agak keras tertanam di air
3: Bila tanah mengandung pasir/tanahnya liat tertanam di air/rawa.
- (35) Diisi dengan detail posisi Jembatan berada: Sebutkan berada di atas sungai atau jalan apa dan menghubungkan jalan apa.
- (36) Diisi dengan jenis Jembatan.
- (37) Diisi dengan jenis Jembatan Lainnya yang tidak terdapat pada pilihan.
- (38) Diisi panjang Jembatan.
- (39) Diisi dengan lebar Jembatan.
- (40) Diisi dengan luas Jembatan.
- (41) Diisi dengan tinggi pilar Jembatan.
- (42) Diisi dengan lebar trotoar pada Jembatan.
- (43) Diisi dengan jumlah tumpuan Jembatan.
- (44) Diisi dengan panjang kerb.
- (45) Diisi dengan posisi Jembatan.
- (46) Diisi dengan jenis perkerasan lantai Jembatan.
- (47) Diisi dengan panjang perkerasan.
- (48) Diisi dengan lebar lantai perkerasan.
- (49) Diisi dengan jumlah sambungan.
- (50) Diisi dengan panjang sambungan.

- (51) Diisi dengan jenis bahan sandaran (contoh: Pipa, Baja).
- (52) Diisi dengan panjang sandaran.
- (53) Diisi dengan jenis bahan tiang sandaran (contoh: Beton, Baja).
- (54) Diisi dengan jumlah sandaran.
- (55) Diisi dengan mencentang salah satu Jenis Saluran Air.
- (56) Diisi dengan mencentang bahan pembuatan Saluran Air.
- (57) Diisi dengan luas penampang.
- (58) Diisi dengan panjang saluran air.
- (59) Diisi dengan mencentang salah satu jenis pengaman sungai/pantai.
- (60) Diisi dengan volume konstruksi pengaman sungai/pantai.
- (61) Diisi dengan panjang bak *reservoir*.
- (62) Diisi dengan lebar bak *reservoir*.
- (63) Diisi dengan tinggi bak *reservoir*.
- (64) Diisi dengan jenis bangunan air lainnya selain Bangunan, Jembatan, Saluran, Pengaman Sungai, dan Bak penampungan.
- (65) Diisi dengan mencentang salah satu jenis konstruksi pembuatan bangunan air lainnya.
- (66) Diisi dengan volume konstruksi pengaman sungai/pantai.
- (67) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada.
- (68) Diisi dengan mencentang status penggunaan BMN tersebut sesuai kondisi terkini.
- (69) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tuisatker.
- (70) Diisi keterangan tambahan pada angka (69), seperti Persetujuan PSP, dan lain sebagainya.
- (71) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (72) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (71), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan, besaran PNBK, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya.
- (73) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (74) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (73).
- (75) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain atau pihak lain.
- (76) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana tercantum pada angka (75), seperti persetujuan penggunaan sementara atau persetujuan pengoperasionalan oleh pihak lain untuk penyelenggaraan tuisatker oleh Menteri Keuangan, jangka waktu penggunaan, dan lain sebagainya.
- (77) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudah ada rencana untuk menggunakan BMN tersebut.
- (78) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (77).
- (79) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan/pemanfaatan.
- (80) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (79).
- (81) Diisi total luas penggunaan BMN.
- (82) Diisi dengan pihak yang sedang memanfaatkan/menggunakan seperti satker lain/pihak lain (mitra kerjasama pemanfaatan BMN).
- (83) Diisi dengan foto BMN, menggambarkan kondisi BMN terkini, termasuk mewakili tampak luar dan tampak dalam bangunan.
- (84) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada.
- (85) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.
- (86) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.
- (87) Diisi dengan NIP petugas pendataan BMN.

Mapping Formulir Objek Pendataan Penilaian Kembali BMN

| GOL | BID | KEL | SUB KEL | SUB- SUB KEL | SAT | URAIAN | FORM |
|-----|-----|-----|------------|--------------------|------|--|----------|
| 4 | 00 | 00 | 00 | 000 | | GEDUNG DAN BANGUNAN | |
| 4 | 01 | 00 | 00 | 000 | | BANGUNAN GEDUNG | |
| 4 | 01 | 01 | 00 | 000 | | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA | |
| 4 | 01 | 01 | 01 | 000 | | BANGUNAN GEDUNG KANTOR | |
| 4 | 01 | 01 | 01 | 001 | Unit | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 01 | 002 | Unit | Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 01 | 003 | Unit | Bangunan Gedung Kantor Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 01 | 004 | Unit | Rumah Panel | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 01 | 999 | | Bangunan Gedung Kantor Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 02 | 000 | | BANGUNAN GUDANG | |
| 4 | 01 | 01 | 02 | 001 | Unit | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 02 | 002 | Unit | Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 02 | 003 | Unit | Bangunan Gudang Tertutup Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 02 | 004 | Unit | Bangunan Gudang Terbuka Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 02 | 005 | Unit | Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 02 | 006 | Unit | Bangunan Gudang Terbuka Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 02 | 007 | Unit | Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Sementara (<i>Intern Storage</i>) | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 02 | 008 | Unit | Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 02 | 009 | Unit | Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Aktivitas Tinggi | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 02 | 010 | Unit | Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Cair | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 02 | 011 | Unit | Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Padat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 02 | 012 | Unit | Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Gas | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 02 | 013 | Unit | Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 02 | 999 | | Bangunan Gudang Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 03 | 000 | | BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR | |
| 4 | 01 | 01 | 03 | 001 | Unit | Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 03 | 002 | Unit | Bangunan Bengkel/Hanggar Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 03 | 003 | Unit | Bangunan Bengkel/Hanggar Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 03 | 999 | | Bangunan Gedung Untuk | |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|------|---|----------|
| | | | | | | Bengkel/Hanggar Lainnya | |
| 4 | 01 | 01 | 04 | 000 | | BANGUNAN GEDUNG INSTALASI | |
| 4 | 01 | 01 | 04 | 001 | Unit | Gedung Instalasi Studio | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 04 | 002 | Unit | Gedung Instalasi Pemancar | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 04 | 003 | Unit | Bangunan Gedung Instalasi Radar | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 04 | 004 | Unit | Bangunan Gedung Reaktor Nuklir | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 04 | 005 | Unit | Bangunan Gedung Instalasi Pertahanan dan Keamanan | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 04 | 999 | | Bangunan Gedung Instalasi Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 05 | 000 | | BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM | |
| 4 | 01 | 01 | 05 | 001 | Unit | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 05 | 002 | Unit | Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 05 | 003 | Unit | Bangunan Gedung Laboratorium Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 05 | 999 | | Bangunan Gedung Laboratorium Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 06 | 000 | | BANGUNAN KESEHATAN | |
| 4 | 01 | 01 | 06 | 001 | Unit | Bangunan Rumah Sakit Umum | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 06 | 002 | Unit | Bangunan Rumah Sakit Khusus | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 06 | 003 | Unit | Bangunan Rumah Sakit Kusta | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 06 | 004 | Unit | Bangunan Rumah Sakit Jiwa | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 06 | 005 | Unit | Bangunan Rumah Sakit Paru-Paru | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 06 | 006 | Unit | Bangunan Rumah Sakit Gigi | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 06 | 007 | Unit | Bangunan Rumah Sakit Jantung | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 06 | 008 | Unit | Bangunan Rumah Sakit Kanker | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 06 | 009 | Unit | Bangunan Rumah Sakit Bersalin Dan Lain-Lain | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 06 | 010 | Unit | Bangunan Klinik/Puskesmas | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 06 | 011 | Unit | Bangunan Rumah Sakit Hewan | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 06 | 012 | Unit | Bangunan Puskesmas Pembantu | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 06 | 013 | Unit | Bangunan Tempat Praktek Dokter | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 06 | 014 | Unit | Bangunan Tempat Praktek Bidan | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 06 | 015 | Unit | Bangunan Posyandu | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 06 | 016 | Unit | Bangunan Polindes (Pondok Bersalin Desa) | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 06 | 017 | Unit | Bangunan Apotik | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 06 | 018 | Unit | Bangunan Toko khusus obat/jamu | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 06 | 999 | | Bangunan Kesehatan Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 07 | 000 | | BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM | |
| 4 | 01 | 01 | 07 | 001 | Unit | Bangunan Oceanarium/Observatorium Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 07 | 002 | Unit | Bangunan Oceanarium/Observatorium Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 07 | 003 | Unit | Bangunan Oceanarium/Observatorium Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 07 | 999 | | Bangunan Oceanarium/Observatorium Lainnya | Bangunan |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|------|---|----------|
| 4 | 01 | 01 | 08 | 000 | | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH | |
| 4 | 01 | 01 | 08 | 001 | Unit | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 08 | 002 | Unit | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 08 | 003 | Unit | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 08 | 999 | | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 09 | 000 | | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN | |
| 4 | 01 | 01 | 09 | 001 | Unit | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 09 | 002 | Unit | Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 09 | 003 | Unit | Bangunan Gedung Pertemuan Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 09 | 999 | | Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 10 | 000 | | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN | |
| 4 | 01 | 01 | 10 | 001 | Unit | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 10 | 002 | Unit | Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 10 | 003 | Unit | Bangunan Gedung Pendidikan Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 10 | 004 | Unit | Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 10 | 999 | | Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 11 | 000 | | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA | |
| 4 | 01 | 01 | 11 | 001 | Unit | Gedung Olah Raga Tertutup Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 11 | 002 | Unit | Gedung Olah Raga Tertutup Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 11 | 003 | Unit | Gedung Olah Raga Tertutup Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 11 | 004 | Unit | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 11 | 005 | Unit | Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 11 | 006 | Unit | Bangunan Olah Raga Terbuka Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 11 | 007 | Unit | Bangunan Gedung Olah Raga Kolam Renang | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 11 | 999 | | Bangunan Gedung Tempat Olah Raga Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 12 | 000 | | BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR | |
| 4 | 01 | 01 | 12 | 001 | Unit | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | Bangunan |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|------|--|----------|
| | | | | | | Permanen | |
| 4 | 01 | 01 | 12 | 002 | Unit | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 12 | 003 | Unit | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 12 | 999 | | Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 13 | 000 | | BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA | |
| 4 | 01 | 01 | 13 | 001 | Unit | Gedung Pos Jaga Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 13 | 002 | Unit | Gedung Pos Jaga Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 13 | 003 | Unit | Gedung Pos Jaga Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 13 | 004 | Unit | Gedung Menara Peninjau Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 13 | 005 | Unit | Gedung Menara Peninjau Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 13 | 006 | Unit | Gedung Menara Peninjau Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 13 | 007 | Unit | Gedung Pos Pamantas Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 13 | 008 | Unit | Gedung Pos Pamantas Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 13 | 009 | Unit | Gedung Pos Pamantas Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 13 | 999 | | Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 14 | 000 | | BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL | |
| 4 | 01 | 01 | 14 | 001 | Unit | Gedung Garasi/Pool Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 14 | 002 | Unit | Gedung Garasi/Pool Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 14 | 003 | Unit | Gedung Garasi/Pool Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 14 | 999 | | Bangunan Gedung Garasi/Pool Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 15 | 000 | | BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN | |
| 4 | 01 | 01 | 15 | 001 | Unit | Gedung Pemotong Hewan Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 15 | 002 | Unit | Gedung Pemotong Hewan Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 15 | 003 | Unit | Gedung Pemotong Hewan Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 15 | 999 | | Bangunan Gedung Pemotong Hewan Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 16 | 000 | | BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN | |
| 4 | 01 | 01 | 16 | 001 | Unit | Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 16 | 002 | Unit | Bangunan Gedung Perpustakaan Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 16 | 003 | Unit | Bangunan Gedung Perpustakaan Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 16 | 999 | | Bangunan Gedung Perpustakaan Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 17 | 000 | | BANGUNAN GEDUNG MUSIUM | |
| 4 | 01 | 01 | 17 | 001 | Unit | Bangunan Gedung Musium Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 17 | 002 | Unit | Bangunan Gedung Musium Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 17 | 003 | Unit | Bangunan Gedung Musium Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 17 | 999 | | Bangunan Gedung Musium Lainnya | Bangunan |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|------|--|----------|
| 4 | 01 | 01 | 18 | 000 | | BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA | |
| 4 | 01 | 01 | 18 | 001 | Unit | Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 18 | 002 | Unit | Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 18 | 003 | Unit | Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 18 | 004 | Buah | Bangunan Halte/Shelter | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 18 | 999 | | Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 19 | 000 | | BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN | |
| 4 | 01 | 01 | 19 | 001 | Unit | Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 19 | 002 | Unit | Bangunan Pengujian Kelaikan Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 19 | 003 | Unit | Bangunan Pengujian Kelaikan Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 19 | 999 | | Bangunan Pengujian Kelaikan Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 20 | 000 | | BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN | |
| 4 | 01 | 01 | 20 | 001 | Unit | Bangunan Gedung L P Kelas I | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 20 | 002 | Unit | Bangunan Gedung L P Kelas II | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 20 | 999 | | Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 21 | 000 | | BANGUNAN RUMAH TAHANAN | |
| 4 | 01 | 01 | 21 | 001 | Unit | Bangunan Gedung Rutan Kelas I | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 21 | 002 | Unit | Bangunan Gedung Rutan Kelas II | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 21 | 003 | Unit | Gedung Tahanan Karantina | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 21 | 999 | | Bangunan Rumah Tahanan Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 22 | 000 | | BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM | |
| 4 | 01 | 01 | 22 | 001 | Unit | Bangunan Gedung Krematorium Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 22 | 002 | Unit | Bangunan Gedung Krematorium Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 22 | 003 | Unit | Bangunan Gedung Krematorium Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 22 | 999 | | Bangunan Gedung Krematorium Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 23 | 000 | | BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN | |
| 4 | 01 | 01 | 23 | 001 | Unit | Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 23 | 002 | Unit | Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 23 | 003 | Unit | Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 23 | 999 | | Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Lainnya | Bangunan |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|------|---|----------|
| 4 | 01 | 01 | 24 | 000 | | BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN | |
| 4 | 01 | 01 | 24 | 001 | Unit | Bangunan Tempat Sidang/ <i>Zitting Plaats</i> | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 24 | 999 | | Bangunan Tempat Persidangan Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 25 | 000 | | BANGUNAN TERBUKA | |
| 4 | 01 | 01 | 25 | 001 | Unit | Bangunan Lantai Jemur Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 25 | 002 | Unit | Bangunan Lantai Jemur Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 25 | 003 | Unit | Bangunan Lantai Jemur Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 25 | 999 | | Bangunan Terbuka Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 26 | 000 | | BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM | |
| 4 | 01 | 01 | 26 | 001 | Unit | Bangunan Penampung Sekam Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 26 | 002 | Unit | Bangunan Penampung Sekam Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 26 | 003 | Unit | Bangunan Penampung Sekam Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 26 | 999 | | Bangunan Penampung Sekam Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 27 | 000 | | BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) | |
| 4 | 01 | 01 | 27 | 001 | Unit | Bangunan TPI Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 27 | 002 | Unit | Bangunan TPI Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 27 | 003 | Unit | Bangunan TPI Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 27 | 999 | | Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 000 | | BANGUNAN INDUSTRI | |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 001 | Unit | Bangunan Industri Makanan | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 002 | Unit | Bangunan Industri Minuman | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 003 | Unit | Bangunan Industri alat RT | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 004 | Unit | Bangunan Industri Pakaian/Carment | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 005 | Unit | Bangunan Industri Baja/Besi/Logam | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 006 | Unit | Bangunan Industri Pengemasan | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 007 | Unit | Bangunan Industri Bengkel | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 008 | Unit | Bangunan Industri Penyulingan Minyak | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 009 | Unit | Bangunan Industri Kimia Dan Pupuk | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 010 | Unit | Bangunan Industri Obat-Obatan | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 011 | Unit | Bangunan Industri Semen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 012 | Unit | Bangunan Industri Batu-Bata/Batako | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 013 | Unit | Bangunan Industri Genteng | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 014 | Unit | Bangunan Industri Percetakan | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 015 | Unit | Bangunan Industri Tekstil | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 016 | Unit | Bangunan Industri Alat Olah Raga | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 017 | Unit | Bangunan Industri Kendaraan/Otomotif | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 018 | Unit | Bangunan Industri Persenjataan | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 019 | Unit | Bangunan Industri Kapal Udara | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 020 | Unit | Bangunan Industri Kapal Laut | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 021 | Unit | Bangunan Industri Kereta Api | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 022 | Unit | Bangunan Industri Keramik/Marmer | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 023 | Unit | Bangunan Pabrik Es | Bangunan |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|------|---|----------|
| 4 | 01 | 01 | 28 | 024 | Unit | Bangunan Pasar Ikan Higienis/PIH | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 025 | Unit | Bangunan Depo Pasar Ikan | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 026 | Unit | Bangunan Pasar/Raiser Ikan Hias | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 28 | 999 | | Bangunan Industri Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 29 | 000 | | BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN | |
| 4 | 01 | 01 | 29 | 001 | Unit | Bangunan Untuk Kandang | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 29 | 002 | Unit | Bangunan Kolam/Bak Ikan | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 29 | 003 | Unit | Bangunan Pembesar Ikan | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 29 | 999 | | Bangunan Peternakan/Perikanan Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 30 | 000 | | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA | |
| 4 | 01 | 01 | 30 | 001 | Unit | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 30 | 002 | Unit | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 30 | 003 | Unit | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 30 | 004 | Unit | Gedung Pengujian Kendaraan Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 30 | 999 | | Bangunan Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 31 | 000 | | BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA | |
| 4 | 01 | 01 | 31 | 001 | Unit | Bunker <i>Seismik Vault</i> | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 31 | 002 | Unit | Bangunan <i>Seismik Vault</i> di Atas Tanah | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 31 | 003 | Unit | Bangunan Magnet Bumi | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 31 | 004 | Unit | Bangunan Pilar Gaya Berat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 31 | 005 | Unit | Bangunan Teropong Bintang Transit | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 31 | 006 | Unit | Bangunan Rukyat Hilal | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 31 | 999 | | Bangunan Peralatan Geofisika Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 32 | 000 | | BANGUNAN FASILITAS UMUM | |
| 4 | 01 | 01 | 32 | 001 | Unit | Bangunan Tempat Parkir | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 32 | 002 | Unit | Bangunan Tempat Bermain Anak | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 32 | 003 | Unit | Bangunan Penerangan Jalan | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 32 | 004 | Unit | Bangunan Penerangan Taman | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 32 | 999 | | Bangunan Fasilitas Umum Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 33 | 000 | | BANGUNAN PARKIR | |
| 4 | 01 | 01 | 33 | 001 | Unit | Bangunan Parkir Terbuka Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 33 | 002 | Unit | Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 33 | 003 | Unit | Bangunan Parkir Terbuka Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 33 | 004 | Unit | Bangunan Parkir Tertutup Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 33 | 005 | Unit | Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 33 | 006 | Unit | Bangunan Parkir Tertutup Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 33 | 999 | | Bangunan Parkir Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 34 | 000 | | TAMAN | |
| 4 | 01 | 01 | 34 | 001 | Unit | Taman Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 34 | 002 | Unit | Taman Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 34 | 999 | | Taman Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 01 | 99 | 000 | | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA | |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|------|---|----------|
| 4 | 01 | 01 | 99 | 999 | | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 00 | 000 | | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL | |
| 4 | 01 | 02 | 01 | 000 | | RUMAH NEGARA GOLONGAN I | |
| 4 | 01 | 02 | 01 | 001 | Unit | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 01 | 002 | Unit | Rumah Negara Golongan I Tipe A Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 01 | 003 | Unit | Rumah Negara Golongan I Tipe A Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 01 | 004 | Unit | Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 01 | 005 | Unit | Rumah Negara Golongan I Tipe B Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 01 | 006 | Unit | Rumah Negara Golongan I Tipe B Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 01 | 007 | Unit | Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 01 | 008 | Unit | Rumah Negara Golongan I Tipe C Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 01 | 009 | Unit | Rumah Negara Golongan I Tipe C Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 01 | 010 | Unit | Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 01 | 011 | Unit | Rumah Negara Golongan I Tipe D Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 01 | 012 | Unit | Rumah Negara Golongan I Tipe D Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 01 | 013 | Unit | Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 01 | 014 | Unit | Rumah Negara Golongan I Tipe E Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 01 | 015 | Unit | Rumah Negara Golongan I Tipe E Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 01 | 999 | | Rumah Negara Golongan I Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 02 | 000 | | RUMAH NEGARA GOLONGAN II | |
| 4 | 01 | 02 | 02 | 001 | Unit | Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 02 | 002 | Unit | Rumah Negara Golongan II Tipe A Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 02 | 003 | Unit | Rumah Negara Golongan II Tipe A Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 02 | 004 | Unit | Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 02 | 005 | Unit | Rumah Negara Golongan II Tipe B Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 02 | 006 | Unit | Rumah Negara Golongan II Tipe B Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 02 | 007 | Unit | Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 02 | 008 | Unit | Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 02 | 009 | Unit | Rumah Negara Golongan II Tipe C Darurat | Bangunan |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|------|---|----------|
| | | | | | | Darurat | |
| 4 | 01 | 02 | 02 | 010 | Unit | Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 02 | 011 | Unit | Rumah Negara Golongan II Tipe D Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 02 | 012 | Unit | Rumah Negara Golongan II Tipe D Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 02 | 013 | Unit | Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 02 | 014 | Unit | Rumah Negara Golongan II Tipe E Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 02 | 015 | Unit | Rumah Negara Golongan II Tipe E Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 02 | 999 | | Rumah Negara Golongan II Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 03 | 000 | | RUMAH NEGARA GOLONGAN III | |
| 4 | 01 | 02 | 03 | 001 | Unit | Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 03 | 002 | Unit | Rumah Negara Golongan III Tipe A Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 03 | 003 | Unit | Rumah Negara Golongan III Tipe A Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 03 | 004 | Unit | Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 03 | 005 | Unit | Rumah Negara Golongan III Tipe B Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 03 | 006 | Unit | Rumah Negara Golongan III Tipe B Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 03 | 007 | Unit | Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 03 | 008 | Unit | Rumah Negara Golongan III Tipe C Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 03 | 009 | Unit | Rumah Negara Golongan III Tipe C Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 03 | 010 | Unit | Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 03 | 011 | Unit | Rumah Negara Golongan III Tipe D Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 03 | 012 | Unit | Rumah Negara Golongan III Tipe D Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 03 | 013 | Unit | Rumah Negara Golongan III Tipe E Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 03 | 014 | Unit | Rumah Negara Golongan III Tipe E Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 03 | 015 | Unit | Rumah Negara Golongan III Tipe E Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 03 | 999 | | Rumah Negara Golongan III Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 04 | 000 | | MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN | |
| 4 | 01 | 02 | 04 | 001 | Unit | Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 04 | 002 | Unit | Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 04 | 003 | Unit | Mess/Wisma/Bungalow/Tempat | Bangunan |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|------|---|----------|
| | | | | | | Peristirahatan Darurat | |
| 4 | 01 | 02 | 04 | 999 | | Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 05 | 000 | | ASRAMA | |
| 4 | 01 | 02 | 05 | 001 | Unit | Asrama Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 05 | 002 | Unit | Asrama Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 05 | 003 | Unit | Asrama Darurat | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 05 | 004 | Unit | Bangunan Ramah Bencana | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 05 | 999 | | Asrama Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 06 | 000 | | HOTEL | |
| 4 | 01 | 02 | 06 | 001 | Unit | Hotel Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 06 | 002 | Unit | Hotel Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 06 | 999 | | Hotel Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 07 | 000 | | MOTEL | |
| 4 | 01 | 02 | 07 | 001 | Unit | Motel Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 07 | 002 | Unit | Motel Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 07 | 999 | | Motel Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 08 | 000 | | FLAT/RUMAH SUSUN | |
| 4 | 01 | 02 | 08 | 001 | Unit | Flat/Rumah Susun Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 08 | 002 | Unit | Flat/Rumah Susun Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 08 | 999 | | Flat/Rumah Susun Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 09 | 000 | | RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGGOLONGAN | |
| 4 | 01 | 02 | 09 | 001 | Unit | Rumah Negara dalam proses penggolongan A | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 09 | 002 | Unit | Rumah Negara dalam proses penggolongan B | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 09 | 003 | Unit | Rumah Negara dalam proses penggolongan C | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 09 | 004 | Unit | Rumah Negara dalam proses penggolongan D | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 09 | 005 | Unit | Rumah Negara dalam proses penggolongan E | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 09 | 999 | | Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 10 | 000 | | PANTI ASUHAN | |
| 4 | 01 | 02 | 10 | 001 | Unit | Panti Asuhan | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 10 | 999 | | Panti Asuhan Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 11 | 000 | | APARTEMEN | |
| 4 | 01 | 02 | 11 | 001 | Unit | Apartemen | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 11 | 999 | | Apartemen Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 12 | 000 | | RUMAH TIDAK BERSUSUN | |
| 4 | 01 | 02 | 12 | 001 | Unit | Rumah Sederhana Sehat | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 12 | 002 | Unit | Rumah Sederhana | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 12 | 003 | Unit | Rumah Khusus | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 12 | 999 | | Rumah Tidak Bersusun Lainnya | Bangunan |
| 4 | 01 | 02 | 99 | 000 | | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA | |
| 4 | 01 | 02 | 99 | 999 | | Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | Bangunan |
| 4 | 02 | 00 | 00 | 000 | | MONUMEN | |
| 4 | 02 | 01 | 00 | 000 | | CANDI/TUGU | |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|------|--|------------------|
| | | | | | | PERINGATAN/PRASASTI | |
| 4 | 02 | 01 | 01 | 000 | | CANDI | |
| 4 | 02 | 01 | 01 | 001 | Unit | Candi | Bangunan Lainnya |
| 4 | 02 | 01 | 01 | 999 | | Candi Lainnya | Bangunan Lainnya |
| 4 | 02 | 01 | 02 | 000 | | TUGU | |
| 4 | 02 | 01 | 02 | 001 | Unit | Tugu Kemerdekaan | Bangunan Lainnya |
| 4 | 02 | 01 | 02 | 002 | Unit | Tugu Pembangunan | Bangunan Lainnya |
| 4 | 02 | 01 | 02 | 999 | | Tugu Peringatan Lainnya | Bangunan Lainnya |
| 4 | 02 | 01 | 03 | 000 | | BANGUNAN PENINGGALAN | |
| 4 | 02 | 01 | 03 | 001 | Unit | Istana Peninggalan | Bangunan |
| 4 | 02 | 01 | 03 | 002 | Unit | Rumah Adat | Bangunan |
| 4 | 02 | 01 | 03 | 003 | Unit | Rumah Peninggalan Sejarah | Bangunan |
| 4 | 02 | 01 | 03 | 004 | Unit | Makam Bersejarah | Bangunan Lainnya |
| 4 | 02 | 01 | 03 | 999 | | Bangunan Peninggalan Lainnya | |
| 4 | 02 | 01 | 99 | 000 | | CANDI/TUGU PERINGATAN/ PRASASTI LAINNYA | |
| 4 | 02 | 01 | 99 | 999 | | Bangunan Peninggalan Lainnya | Bangunan Lainnya |
| 4 | 02 | 01 | 99 | 999 | | Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya | Bangunan Lainnya |
| 4 | 03 | 00 | 00 | 000 | | BANGUNAN MENARA | |
| 4 | 03 | 01 | 00 | 000 | | BANGUNAN MENARA PERAMBUAN | |
| 4 | 03 | 01 | 01 | 000 | | BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI | |
| 4 | 03 | 01 | 01 | 001 | Unit | Menara Suar Listrik Diesel | Bangunan Lainnya |
| 4 | 03 | 01 | 01 | 002 | Unit | Menara Suar Listrik Non Diesel | Bangunan Lainnya |
| 4 | 03 | 01 | 01 | 003 | Unit | Rambu Suar | Bangunan Lainnya |
| 4 | 03 | 01 | 01 | 004 | Unit | Pelampung Suar | Bangunan Lainnya |
| 4 | 03 | 01 | 01 | 005 | Unit | Rambu Tanda Silang | Bangunan Lainnya |
| 4 | 03 | 01 | 01 | 999 | | Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai Lainnya | Bangunan Lainnya |
| 4 | 03 | 01 | 02 | 000 | | BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI | |
| 4 | 03 | 01 | 02 | 001 | Unit | Anak Pelampung | Bangunan Lainnya |
| 4 | 03 | 01 | 02 | 002 | Unit | Rambu Berpuncak | Bangunan Lainnya |
| 4 | 03 | 01 | 02 | 999 | | Bangunan Perambuan Penerangan Pantai Lainnya | Bangunan Lainnya |
| 4 | 03 | 01 | 03 | 000 | | BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI | |
| 4 | 03 | 01 | 03 | 001 | Unit | Bangunan Menara Telpon | Bangunan |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|------|--|------------------|
| | | | | | | | Lainnya |
| 4 | 03 | 01 | 03 | 002 | Unit | Bangunan Menara Radio | Bangunan Lainnya |
| 4 | 03 | 01 | 03 | 003 | Unit | Bangunan Menara Televisi | Bangunan Lainnya |
| 4 | 03 | 01 | 03 | 004 | Unit | Bangunan Menara Pengatur Lalulintas Udara | Bangunan Lainnya |
| 4 | 03 | 01 | 03 | 005 | Unit | Bangunan Menara Antena Microwave/Parabolic | Bangunan Lainnya |
| 4 | 03 | 01 | 03 | 999 | | Bangunan Menara Telekomunikasi Lainnya | Bangunan Lainnya |
| 4 | 03 | 01 | 04 | 000 | | BANGUNAN MENARA PENGAWAS | |
| 4 | 03 | 01 | 04 | 001 | Unit | Bangunan Menara Pengawas Permanen | Bangunan Lainnya |
| 4 | 03 | 01 | 04 | 002 | Unit | Bangunan Menara Pengawas Semi Permanen | Bangunan Lainnya |
| 4 | 03 | 01 | 04 | 003 | Unit | Bangunan Menara Pengawas Semi Darurat | Bangunan Lainnya |
| 4 | 03 | 01 | 04 | 999 | | Bangunan Menara Pengawas Lainnya | Bangunan Lainnya |
| 4 | 03 | 01 | 99 | 000 | | BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA | |
| 4 | 03 | 01 | 99 | 999 | | Bangunan Menara Perambuan Lainnya | Bangunan Lainnya |
| 4 | 04 | 00 | 00 | 000 | | TUGU TITIK KONTROL/PASTI | |
| 4 | 04 | 01 | 00 | 000 | | TUGU/TANDA BATAS | |
| 4 | 04 | 01 | 01 | 000 | | TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI | |
| 4 | 04 | 01 | 01 | 001 | Unit | Tugu/Tanda Batas Administrasi Negara | Bangunan Lainnya |
| 4 | 04 | 01 | 01 | 002 | Unit | Tugu/Tanda Batas Administrasi Propinsi | Bangunan Lainnya |
| 4 | 04 | 01 | 01 | 003 | Unit | Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten | Bangunan Lainnya |
| 4 | 04 | 01 | 01 | 004 | Unit | Tugu/Tanda Batas Administrasi Kotamadya | Bangunan Lainnya |
| 4 | 04 | 01 | 01 | 005 | Unit | Tugu/Tanda Batas Administrasi Kota Administratif | Bangunan Lainnya |
| 4 | 04 | 01 | 01 | 006 | Unit | Tugu/Tanda Batas Administrasi Kecamatan | Bangunan Lainnya |
| 4 | 04 | 01 | 01 | 007 | Unit | Tugu/Tanda Batas Administrasi Desa | Bangunan Lainnya |
| 4 | 04 | 01 | 01 | 008 | Unit | Tugu/Tanda Batas Administrasi Kelurahan | Bangunan Lainnya |
| 4 | 04 | 01 | 01 | 009 | Unit | Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan | Bangunan Lainnya |
| 4 | 04 | 01 | 01 | 010 | Unit | Tugu/Tanda Batas Damija (Daerah Milik Jalan) | Bangunan Lainnya |
| 4 | 04 | 01 | 01 | 011 | Unit | Tugu/Tanda Batas Damaja (Daerah Manfaat Jalan) | Bangunan Lainnya |
| 4 | 04 | 01 | 01 | 999 | | Tugu/Tanda Batas Administrasi Lainnya | Bangunan Lainnya |
| 4 | 04 | 01 | 02 | 000 | | TUGU/TANDA JARING KONTROL GEODESI | |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|----------------|--|------------------|
| 4 | 04 | 01 | 02 | 002 | Unit | Jaring Kontrol Vertikal | Bangunan Lainnya |
| 4 | 04 | 01 | 02 | 003 | Unit | Jaring Kontrol Gaya Berat | Bangunan Lainnya |
| 4 | 04 | 01 | 02 | 004 | Unit | Jaring Kontrol Pasang Surut Paras Muka Laut | Bangunan Lainnya |
| 4 | 04 | 01 | 02 | 005 | Unit | Jaring Kontrol Pasang Surut Sungai Dan Danau | Bangunan Lainnya |
| 4 | 04 | 01 | 02 | 006 | Unit | Jaring Kontrol Pasang Surut Bumi | Bangunan Lainnya |
| 4 | 04 | 01 | 02 | 007 | Unit | Jaring Kontrol Navigasi | Bangunan Lainnya |
| 4 | 04 | 01 | 02 | 999 | | Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi Lainnya | Bangunan Lainnya |
| 4 | 04 | 01 | 03 | 000 | | PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA | |
| 4 | 04 | 01 | 03 | 001 | Unit | Kerangka Dasar Kadastral Orde 2 | Bangunan Lainnya |
| 4 | 04 | 01 | 03 | 002 | Unit | Kerangka Dasar Kadastral Orde 3 | Bangunan Lainnya |
| 4 | 04 | 01 | 03 | 003 | Unit | Kerangka Dasar Kadastral Orde 4 | Bangunan Lainnya |
| 4 | 04 | 01 | 03 | 999 | | Kerangka Dasar Kadastral Lainnya | Bangunan Lainnya |
| 4 | 04 | 01 | 04 | 000 | | PAGAR | |
| 4 | 04 | 01 | 04 | 001 | Unit | Pagar Permanen | Bangunan |
| 4 | 04 | 01 | 04 | 002 | Unit | Pagar Semi Permanen | Bangunan |
| 4 | 04 | 01 | 04 | 003 | Unit | Pagar Darurat | Bangunan |
| 4 | 04 | 01 | 04 | 999 | | Pagar Lainnya | Bangunan |
| 4 | 04 | 01 | 99 | 000 | | TUGU/TANDA BATAS LAINNYA | |
| 4 | 04 | 01 | 99 | 999 | | Tugu/Tanda Batas Lainnya | Bangunan Lainnya |
| 5 | 00 | 00 | 00 | 000 | | JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI | |
| 5 | 01 | 00 | 00 | 000 | | JALAN DAN JEMBATAN | |
| 5 | 01 | 01 | 00 | 000 | | JALAN | |
| 5 | 01 | 01 | 01 | 000 | | JALAN NASIONAL | |
| 5 | 01 | 01 | 01 | 001 | m ² | Jalan Nasional Arteri | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 01 | 002 | m ² | Jalan Nasional Kolektor | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 01 | 003 | m ² | Jalan Nasional Bernilai Strategis Nasional | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 01 | 999 | | Jalan Nasional Lainnya | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 02 | 000 | | JALAN PROPINSI | |
| 5 | 01 | 01 | 02 | 001 | m ² | Jalan Propinsi Arteri | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 02 | 002 | m ² | Jalan Propinsi Kolektor | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 02 | 003 | m ² | Jalan Propinsi Lokal | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 02 | 004 | m ² | Jalan Propinsi Bernilai Strategis Propinsi | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 02 | 999 | | Jalan Propinsi Lainnya | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 03 | 000 | | JALAN KABUPATEN | |
| 5 | 01 | 01 | 03 | 001 | m ² | Jalan Kabupaten Arteri | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 03 | 002 | m ² | Jalan Kabupaten Kolektor | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 03 | 003 | m ² | Jalan Kabupaten Lokal | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 03 | 004 | m ² | Jalan Kabupaten Bernilai Strategis Kabupaten | Jalan |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|----------------|--|----------------------------|
| 5 | 01 | 01 | 03 | 999 | | Jalan Kabupaten Lainnya | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 04 | 000 | | JALAN KOTAMADYA | |
| 5 | 01 | 01 | 04 | 001 | m ² | Jalan Kotamadya Arteri | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 04 | 002 | m ² | Jalan Kotamadya Kolektor | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 04 | 003 | m ² | Jalan Kotamadya Lokal | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 04 | 999 | | Jalan Kotamadya Lainnya | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 05 | 000 | | JALAN DESA | |
| 5 | 01 | 01 | 05 | 001 | m ² | Jalan Desa | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 05 | 999 | | Jalan Desa Lainnya | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 06 | 000 | | JALAN TOL | |
| 5 | 01 | 01 | 06 | 001 | m ² | Jalan Tol | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 06 | 999 | | Jalan Tol Lainnya | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 07 | 000 | | JALAN KERETA API | |
| 5 | 01 | 01 | 07 | 001 | m ² | Jalan Kereta Api Bantalan Besi | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 07 | 002 | m ² | Jalan Kereta Api Bantalan Beton | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 07 | 003 | m ² | Jalan Kereta Api Bantalan Kayu | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 07 | 004 | m ² | Jalan Kereta Api Bantalan Beton untuk Lengkung | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 07 | 005 | m ² | Jalan Kereta Api Bantalan Beton untuk Wesel | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 07 | 006 | m ² | Jalan Kereta Api Bantalan Kayu Standar | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 07 | 007 | m ² | Jalan Kereta Api Bantalan Kayu Wesel | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 07 | 008 | m ² | Jalan Kereta Api Bantalan Kayu Jembatan | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 07 | 999 | | Jalan Kereta Api Lainnya | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 08 | 000 | | LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG | |
| 5 | 01 | 01 | 08 | 001 | m ² | Landasan Pacu (Runway) Pesawat Terbang Permukaan Beton | Jalan dan Jembatan Lainnya |
| 5 | 01 | 01 | 08 | 002 | m ² | Landasan Pacu (Runway) Pesawat Terbang Permukaan Aspal | Jalan dan Jembatan Lainnya |
| 5 | 01 | 01 | 08 | 003 | m ² | Landasan Pacu (Runway) Pesawat Terbang Permukaan Batu Karang | Jalan dan Jembatan Lainnya |
| 5 | 01 | 01 | 08 | 004 | m ² | Landasan Pacu (Runway) Pesawat Terbang Permukaan Rumput | Jalan dan Jembatan Lainnya |
| 5 | 01 | 01 | 08 | 005 | m ² | Helipad | Jalan dan Jembatan Lainnya |
| 5 | 01 | 01 | 08 | 999 | | Landasan Pacu Pesawat Terbang Lainnya | Jalan dan Jembatan Lainnya |
| 5 | 01 | 01 | 09 | 000 | | JALAN KHUSUS | |
| 5 | 01 | 01 | 09 | 001 | m ² | Jalan Khusus Inspeksi | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 09 | 002 | m ² | Jalan Khusus Kompleks | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 09 | 003 | m ² | Jalan Khusus Proyek | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 09 | 004 | m ² | Jalan Khusus Quarry | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 09 | 005 | m ² | Jalan Khusus Lori | Jalan |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|----------------|--|----------|
| 5 | 01 | 01 | 09 | 006 | m ² | Jalan Khusus Badan Hukum | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 09 | 007 | m ² | Jalan Khusus Perorangan | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 09 | 008 | m ² | Jalan Khusus Lainnya | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 09 | 009 | m ² | Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar) | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 09 | 999 | | Lainnya (Jalan Khusus) | Jalan |
| 5 | 01 | 01 | 99 | 000 | | JALAN LAINNYA | |
| 5 | 01 | 01 | 99 | 999 | | Jalan Lainnya | Jalan |
| 5 | 01 | 02 | 00 | 000 | | JEMBATAN | |
| 5 | 01 | 02 | 01 | 000 | | JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL | |
| 5 | 01 | 02 | 01 | 001 | m ² | Jembatan Pada Jalan Nasional Arteri | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 01 | 002 | m ² | Jembatan Pada Jalan Nasional Kolektor | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 01 | 003 | m ² | Jembatan Pada Jalan Nasional Bernilai Strategis Nasional | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 01 | 999 | | Jembatan Pada Jalan Nasional Lainnya | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 02 | 000 | | JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI | |
| 5 | 01 | 02 | 02 | 001 | m ² | Jembatan Pada Jalan Propinsi Arteri | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 02 | 002 | m ² | Jembatan Pada Jalan Propinsi Kolektor | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 02 | 003 | m ² | Jembatan Pada Jalan Propinsi Lokal | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 02 | 004 | m ² | Jembatan Pada Jalan Propinsi Bernilai Strategis Propinsi | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 02 | 999 | m ² | Jembatan Pada Jalan Propinsi Lainnya | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 03 | 000 | | JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN | |
| 5 | 01 | 02 | 03 | 001 | m ² | Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 03 | 002 | m ² | Jembatan Pada Jalan Kabupaten Kolektor | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 03 | 003 | m ² | Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 03 | 004 | m ² | Jembatan Pada Jalan Kabupaten Strategis Kabupaten | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 03 | 999 | | Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lainnya | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 04 | 000 | | JEMBATAN PADA JALAN KOTAMADYA | |
| 5 | 01 | 02 | 04 | 001 | m ² | Jembatan Pada Jalan Kotamadya Arteri | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 04 | 002 | m ² | Jembatan Pada Jalan Kotamadya Kolektor | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 04 | 003 | m ² | Jembatan Pada Jalan Kotamadya Lokal | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 04 | 999 | | Jembatan Pada Jalan Kotamadya Lainnya | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 05 | 000 | | JEMBATAN PADA JALAN DESA | |
| 5 | 01 | 02 | 05 | 001 | m ² | Jembatan Pada Jalan Desa | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 05 | 999 | | Jembatan Pada Jalan Desa Lainnya | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 06 | 000 | | JEMBATAN PADA JALAN TOL | |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|----------------|---------------------------------|----------|
| 5 | 01 | 02 | 06 | 001 | m ² | Jembatan Pada Jalan Tol | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 06 | 999 | | Jembatan Pada Jalan Tol Lainnya | Jembatan |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|----------------|--|----------|
| 5 | 01 | 02 | 07 | 000 | | JEMBATAN PADA JALAN KERETA API | |
| 5 | 01 | 02 | 07 | 001 | m ² | Jembatan Pada Jalan Kereta Api Bantalan Besi | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 07 | 002 | m ² | Jembatan Pada Jalan Kereta Api Bantalan Beton | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 07 | 003 | m ² | Jembatan Pada Jalan Kereta Api Bantalan Kayu | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 07 | 999 | | Jembatan Pada Jalan Kereta Api Lainnya | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 08 | 000 | | JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG | |
| 5 | 01 | 02 | 08 | 001 | m ² | Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang Permukaan Beton | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 08 | 002 | m ² | Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang Permukaan Aspal | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 08 | 003 | m ² | Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang Permukaan Rumput | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 08 | 999 | | Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang Lainnya | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 09 | 000 | | JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS | |
| 5 | 01 | 02 | 09 | 001 | m ² | Jembatan Pada Jalan Khusus Inspeksi | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 09 | 002 | m ² | Jembatan Pada Jalan Khusus Kompleks | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 09 | 003 | m ² | Jembatan Pada Jalan Khusus Proyek | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 09 | 004 | m ² | Jembatan Pada Jalan Khusus Quarry | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 09 | 005 | m ² | Jembatan Pada Jalan Khusus Lori | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 09 | 006 | m ² | Jembatan Pada Jalan Khusus Badan Hukum | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 09 | 007 | m ² | Jembatan Pada Jalan Khusus Perorangan | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 09 | 999 | | Jembatan Pada Jalan Khusus Lainnya | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 10 | 000 | | JEMBATAN PENYEBERANGAN | |
| 5 | 01 | 02 | 10 | 001 | m ² | Jembatan Penyeberangan Orang | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 10 | 002 | m ² | Jembatan Penyeberangan Kendaraan | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 10 | 003 | m ² | Jembatan Fly Over | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 10 | 004 | m ² | Jembatan Inter Change | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 10 | 005 | m ² | Jembatan Gantung | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 10 | 999 | | Jembatan Penyeberangan Lainnya | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 11 | 000 | | JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA | |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|----------------|---|----------------------------|
| | | | | | | TERMINAL | |
| 5 | 01 | 02 | 11 | 001 | m ² | Dermaga | Jalan dan Jembatan Lainnya |
| 5 | 01 | 02 | 11 | 002 | m ² | Kade | Jalan dan Jembatan Lainnya |
| 5 | 01 | 02 | 11 | 003 | m ² | Embarkasi/Debarkasi | Jalan dan Jembatan Lainnya |
| 5 | 01 | 02 | 11 | 004 | m ² | Jembatan Pantai | Jalan dan Jembatan Lainnya |
| 5 | 01 | 02 | 11 | 999 | | Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal Lainnya | Jalan dan Jembatan Lainnya |
| 5 | 01 | 02 | 12 | 000 | | JEMBATAN PENGUKUR | |
| 5 | 01 | 02 | 12 | 001 | m ² | Jembatan Timbang | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 12 | 002 | m ² | Jembatan KIR/Pengujian | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 12 | 999 | | Jembatan Pengukur Lainnya | Jembatan |
| 5 | 01 | 02 | 99 | 000 | | JEMBATAN LAINNYA | |
| 5 | 01 | 02 | 99 | 999 | | Jembatan Lainnya | Jembatan |
| 5 | 02 | 00 | 00 | 000 | | BANGUNAN AIR | |
| 5 | 02 | 01 | 00 | 000 | | BANGUNAN AIR IRIGASI | |
| 5 | 02 | 01 | 01 | 000 | | BANGUNAN WADUK IRIGASI | |
| 5 | 02 | 01 | 01 | 001 | Unit | Waduk Dengan Bendungan, Tanggul, Menara Pengambilan Pelimpah Ban | Bendungan |
| 5 | 02 | 01 | 01 | 002 | Unit | Waduk Dengan Bendungan, Tanggul Dan Menara Pengambilan | Bendungan |
| 5 | 02 | 01 | 01 | 003 | Unit | Waduk Dengan Menara Pengambilan | Bendungan |
| 5 | 02 | 01 | 01 | 004 | Unit | Waduk Dengan Tanggul, Dan Pintu Air/Menara Pengambilan | Bendungan |
| 5 | 02 | 01 | 01 | 005 | Unit | Waduk Dengan Tanggul Dan Pintu Pengukur Waduk Lapangan | Bendungan |
| 5 | 02 | 01 | 01 | 999 | | Bangunan Waduk Irigasi Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 02 | 000 | | BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI | |
| 5 | 02 | 01 | 02 | 001 | Unit | Bendung | Bendung |
| 5 | 02 | 01 | 02 | 002 | Unit | Bendung Dengan Pintu Bilas | Bendung |
| 5 | 02 | 01 | 02 | 003 | Unit | Bendung Dengan Pompa | Bendung |
| 5 | 02 | 01 | 02 | 004 | Unit | Bangunan Pengambilan Bebas | Bendung |
| 5 | 02 | 01 | 02 | 005 | Unit | Bangunan Pengambilan Bebas Dgn Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi) | Bendung |
| 5 | 02 | 01 | 02 | 006 | Unit | Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi) | Bendung |
| 5 | 02 | 01 | 02 | 999 | | Bangunan Pengambilan Irigasi Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 03 | 000 | | BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI | |
| 5 | 02 | 01 | 03 | 001 | Unit | Saluran Muka (Bangunan Pembawa | Bangunan |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|------|---|----------------------|
| | | | | | | Irigasi) | Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 03 | 002 | Unit | Saluran Induk (Bangunan Pembawa Irigasi) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 03 | 003 | Unit | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 03 | 004 | Unit | Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 03 | 005 | Unit | Saluran Kwarter | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 03 | 006 | Unit | Saluran Pasang Tertutup/Terowongan | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 03 | 007 | Unit | Saluran Suplesi | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 03 | 999 | | Bangunan Pembawa Irigasi Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 04 | 000 | | BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI | |
| 5 | 02 | 01 | 04 | 001 | Unit | Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 04 | 002 | Unit | Saluran Sekunder Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 04 | 003 | Unit | Saluran Tersier Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 04 | 999 | | Bangunan Pembuang Irigasi Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 05 | 000 | | BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI | |
| 5 | 02 | 01 | 05 | 001 | Unit | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 05 | 002 | Unit | Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 05 | 999 | | Bangunan Pengaman Irigasi Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 06 | 000 | | BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI | |
| 5 | 02 | 01 | 06 | 001 | Unit | Bangunan Bagi | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 06 | 002 | Unit | Bangunan Bagi Dan Sadap (Bangunan Pelengkap Irigasi) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 06 | 003 | Unit | Bangunan Sadap (Bangunan Pelengkap Irigasi) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 06 | 004 | Unit | Bangunan Got Miring | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 06 | 005 | Unit | Bangunan Terjun (Bangunan Pelengkap Irigasi) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 06 | 006 | Unit | Bangunan Talang (Bangunan Pelengkap Irigasi) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 06 | 007 | Unit | Bangunan Syphon (Bangunan Pelengkap Irigasi) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 06 | 008 | Unit | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 06 | 009 | Unit | Bangunan Pelimpah Sampah | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 06 | 010 | Unit | Bangunan Pengeluaran/Pintu | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 06 | 011 | Unit | Bangunan Box Tersier (Bangunan | Bangunan |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|------|---|----------------------|
| | | | | | | Pelengkap Irigasi) | Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 06 | 012 | Unit | Bangunan Pengukur | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 06 | 013 | Unit | Bangunan Mandi Hewan | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 06 | 014 | Unit | Bangunan Pertemuan Saluran | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 06 | 015 | Unit | Bangunan Pelengkap Dalam Petak Tersier | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 06 | 016 | Unit | Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Irigasi) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 06 | 999 | | Bangunan Pelengkap Irigasi Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 07 | 000 | | BANGUNAN SAWAH IRIGASI | |
| 5 | 02 | 01 | 07 | 001 | Unit | Bangunan Sawah Irigasi Tehnis | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 07 | 002 | Unit | Bangunan Sawah Irigasi Semi Tehnis | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 07 | 003 | Unit | Bangunan Sawah Irigasi Non Tehnis | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 07 | 999 | | Bangunan Sawah Irigasi Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 99 | 000 | | BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA | |
| 5 | 02 | 01 | 99 | 999 | | Bangunan Air Irigasi Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 00 | 000 | | BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT | |
| 5 | 02 | 02 | 01 | 000 | | BANGUNAN WADUK PASANG SURUT | |
| 5 | 02 | 02 | 01 | 001 | Unit | Waduk Pasang Surut | Bendung |
| 5 | 02 | 02 | 01 | 999 | | Bangunan Waduk Pasang Surut Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 02 | 000 | | BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT | |
| 5 | 02 | 02 | 02 | 001 | Unit | Bangunan Bendung Dengan Pompa | Bendung |
| 5 | 02 | 02 | 02 | 002 | Unit | Bangunan Pengambilan Bebas Dgn Pompa (Bangunan Pengambilan Pasang Surut | Bendung |
| 5 | 02 | 02 | 02 | 999 | | Bangunan Pengambilan Pasang Surut Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 03 | 000 | | BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT | |
| 5 | 02 | 02 | 03 | 001 | Unit | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pasang Surut) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 03 | 002 | Unit | Saluran Induk (Bangunan Pembawa Pasang Surut) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 03 | 003 | Unit | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Pasang Surut) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 03 | 004 | Unit | Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Pasang Surut) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 03 | 005 | Unit | Saluran Penyimpan Air | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 03 | 006 | Unit | Saluran Lahu Lintas Air | Bangunan Air Lainnya |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|------|---|----------------------|
| 5 | 02 | 02 | 03 | 999 | | Bangunan Pembawa Pasang Surut Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 04 | 000 | | SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT | |
| 5 | 02 | 02 | 04 | 001 | Unit | Saluran Induk Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 04 | 002 | Unit | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 04 | 003 | Unit | Saluran Tersier Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 04 | 004 | Unit | Saluran Pengumpul Air | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 04 | 999 | | Saluran Pembuang Pasang Surut Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 05 | 000 | | BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT | |
| 5 | 02 | 02 | 05 | 001 | Unit | Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Pasang Surut) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 05 | 002 | Unit | Bangunan Pemasukan/Pembuang | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 05 | 003 | Unit | Kolam Pasang | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 05 | 999 | | Bangunan Pengaman Pasang Surut Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 06 | 000 | | BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT | |
| 5 | 02 | 02 | 06 | 001 | Unit | Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Pasang Surut) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 06 | 002 | Unit | Bangunan Jembatan Penghalang (Bangunan Pelengkap Pasang Surut) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 06 | 003 | Unit | Bangunan Penutup Penangkis Kotoran | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 06 | 004 | Unit | Bangunan Pengukur Muka Air (Bangunan Pelengkap Pasang Surut) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 06 | 005 | Unit | Bangunan Pengukur Curah Hujan (Bangunan Pelengkap Pasang Surut) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 06 | 999 | | Bangunan Pelengkap Pasang Surut Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 07 | 000 | | BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT | |
| 5 | 02 | 02 | 07 | 001 | Unit | Bangunan Sawah Pasang Surut Teknis | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 07 | 002 | Unit | Bangunan Sawah Pasang Surut Semi Teknis | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 07 | 003 | Unit | Bangunan Sawah Pasang Surut Non Teknis | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 07 | 999 | | Bangunan Sawah Pasang Surut Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 99 | 000 | | BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT LAINNYA | |
| 5 | 02 | 02 | 99 | 999 | | Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 00 | 000 | | BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER | |
| 5 | 02 | 03 | 01 | 000 | | BANGUNAN WADUK | |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|------|---|----------------------|
| | | | | | | PENGEMBANGAN RAWA | |
| 5 | 02 | 03 | 01 | 001 | Unit | Bangunan Waduk | Bendung |
| 5 | 02 | 03 | 01 | 999 | | Bangunan Waduk Pengembangan Rawa Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 02 | 000 | | BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA | |
| 5 | 02 | 03 | 02 | 001 | Unit | Waduk Pengambilan Rawa | Bendung |
| 5 | 02 | 03 | 02 | 999 | | Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 03 | 000 | | BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA | |
| 5 | 02 | 03 | 03 | 001 | Unit | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 03 | 002 | Unit | Saluran Induk (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 03 | 003 | Unit | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 03 | 004 | Unit | Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 03 | 999 | | Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 04 | 000 | | BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA | |
| 5 | 02 | 03 | 04 | 001 | Unit | Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 04 | 002 | Unit | Saluran Sekunder Pembuang (Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 04 | 003 | Unit | Saluran Tersier Pembuang (Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 04 | 999 | | Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 05 | 000 | | BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA | |
| 5 | 02 | 03 | 05 | 001 | Unit | Tanggul Keliling | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 05 | 002 | Unit | Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 05 | 999 | | Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 06 | 000 | | BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA | |
| 5 | 02 | 03 | 06 | 001 | Unit | Bangunan Bagi Dan Sadap (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 06 | 002 | Unit | Bangunan Sadap (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 06 | 003 | Unit | Bangunan Terjun (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 06 | 004 | Unit | Bangunan Syphon (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 06 | 005 | Unit | Bangunan Gorong-Gorong | Bangunan |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|------|--|----------------------|
| | | | | | | (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa) | Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 06 | 006 | Unit | Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 06 | 007 | Unit | Bangunan Jembatan Penghalang (Bgnan Pelengkap Pengembangan Rawa) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 06 | 008 | Unit | Bangunan Pengukur Muka Air (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 06 | 009 | Unit | Bangunan Pengukur Curah Hujan (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 06 | 010 | Unit | Bangunan Penutup Sungai | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 06 | 011 | Unit | Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan/Pembuang | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 06 | 999 | | Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 07 | 000 | | BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA | |
| 5 | 02 | 03 | 07 | 001 | Unit | Bangunan Sawah Rawa Teknis | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 07 | 002 | Unit | Bangunan Sawah Rawa Semi Teknis | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 07 | 003 | Unit | Bangunan Sawah Rawa Non Teknis | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 07 | 999 | | Bangunan Sawah Pengembangan Rawa Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 03 | 99 | 000 | | BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA | |
| 5 | 02 | 03 | 99 | 999 | | Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 00 | 000 | | BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM | |
| 5 | 02 | 04 | 01 | 000 | | BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM | |
| 5 | 02 | 04 | 01 | 001 | Unit | Banguna Waduk Pengaman Sungai/Pantai | Bendung |
| 5 | 02 | 04 | 01 | 002 | Unit | Waduk Dengan Tanggul, Dan Pintu Pembuang (Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam) | Bendung |
| 5 | 02 | 04 | 01 | 999 | | Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 02 | 000 | | BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI | |
| 5 | 02 | 04 | 02 | 001 | Unit | Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 02 | 002 | Unit | Bangunan Pengambilan Pengamanan | Bangunan |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|------|---|----------------------|
| | | | | | | Pantai | Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 02 | 999 | | Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 03 | 000 | | BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI | |
| 5 | 02 | 04 | 03 | 001 | Unit | Bangunan Pembawa Pengaman Sungai | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 03 | 002 | Unit | Bangunan Pembawa Pengaman Pantai | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 03 | 999 | | Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 04 | 000 | | BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI | |
| 5 | 02 | 04 | 04 | 001 | Unit | Saluran Banjir | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 04 | 002 | Unit | Saluran Drainage | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 04 | 999 | | Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 05 | 000 | | BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI | |
| 5 | 02 | 04 | 05 | 001 | Unit | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/pantai) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 05 | 002 | Unit | Pintu Pengatur Banjir | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 05 | 003 | Unit | Coupure/Sodetan | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 05 | 004 | Unit | Kantong Pasir/Lahar/Lumpur | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 05 | 005 | Unit | Chekdam/Penahan Sedimen | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 05 | 006 | Unit | Krib Pengaman Sungai/Pantai | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 05 | 007 | Unit | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 05 | 008 | Unit | Bangunan Pelimpah Banjir | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 05 | 009 | Unit | Dam Konsolidasi | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 05 | 010 | Unit | Peralatan Saringan Sampah (Pond Screen) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 05 | 011 | Unit | Klep Pengatur Banjir | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 05 | 012 | Unit | Bangunan Pemecah Gelombang | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 05 | 013 | Unit | Bangunan Pelantaran Pantai | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 05 | 999 | | Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 06 | 000 | | BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI | |
| 5 | 02 | 04 | 06 | 001 | Unit | Bangunan Syphon (Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai) | Bangunan Air Lainnya |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|------|---|----------------------|
| 5 | 02 | 04 | 06 | 002 | Unit | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 06 | 003 | Unit | Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 06 | 004 | Unit | Bangunan Pengukur Muka Air (Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 06 | 005 | Unit | Bangunan Pengukur Curah Hujan (Bgnan Pelengkap Pengaman Sungai) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 06 | 006 | Unit | Stasiun Pos Penjaga/Pengamat | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 06 | 007 | Unit | Bangunan Dermaga | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 06 | 008 | Unit | Bangunan Stasiun Pompa Pembuang | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 06 | 009 | Unit | <i>Warning System</i> | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 06 | 999 | | Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 04 | 99 | 000 | | BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LAINNYA | |
| 5 | 02 | 04 | 99 | 999 | | Bangunan Pengaman Sungai/pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 05 | 00 | 000 | | BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH | |
| 5 | 02 | 05 | 01 | 000 | | BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR | |
| 5 | 02 | 05 | 01 | 001 | Unit | Embung/Waduk Lapangan | Bendung |
| 5 | 02 | 05 | 01 | 999 | | Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 05 | 02 | 000 | | BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR | |
| 5 | 02 | 05 | 02 | 001 | Unit | Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 05 | 02 | 002 | Unit | Sumur Artetis | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 05 | 02 | 999 | | Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 05 | 03 | 000 | | BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR | |
| 5 | 02 | 05 | 03 | 001 | Unit | Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 05 | 03 | 002 | Unit | Saluran Kuartier | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 05 | 03 | 999 | | Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 05 | 04 | 000 | | BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR | |
| 5 | 02 | 05 | 04 | 001 | Unit | Saluran Pembuang | Bangunan Air Lainnya |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|------|---|----------------------|
| 5 | 02 | 05 | 04 | 999 | | Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 05 | 05 | 000 | | BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR | |
| 5 | 02 | 05 | 05 | 001 | Unit | Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 05 | 05 | 002 | Unit | Bangunan Klimatologi | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 05 | 05 | 003 | Unit | Bangunan Hidrometri | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 05 | 05 | 004 | Unit | Sumur Pengamatan | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 05 | 05 | 999 | | Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 05 | 06 | 000 | | BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR | |
| 5 | 02 | 05 | 06 | 001 | Unit | Bangunan Terjun (Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 05 | 06 | 002 | Unit | Bangunan Talang (Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 05 | 06 | 003 | Unit | Bangunan Syphon (Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 05 | 06 | 004 | Unit | Bangunan Gorong-Gorong (Bgnan Pelengkap Pengembangan Sumber Air) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 05 | 06 | 005 | Unit | Bangunan Box Tersier (Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 05 | 06 | 006 | Unit | Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 05 | 06 | 999 | | Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 05 | 07 | 000 | | BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH | |
| 5 | 02 | 05 | 07 | 001 | Unit | Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah Teknis | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 05 | 07 | 002 | Unit | Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah Semi Teknis | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 05 | 07 | 003 | Unit | Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah Non Teknis | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 05 | 07 | 999 | | Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 05 | 99 | 000 | | BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA | |
| 5 | 02 | 05 | 99 | 999 | | Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 00 | 000 | | BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU | |
| 5 | 02 | 06 | 01 | 000 | | BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/ | |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|------|---|----------------------|
| | | | | | | AIR BAKU | |
| 5 | 02 | 06 | 01 | 001 | Unit | Waduk Penyimpanan Air Baku | Bendung |
| 5 | 02 | 06 | 01 | 002 | Unit | Waduk Penyimpanan Air Hujan | Bendung |
| 5 | 02 | 06 | 01 | 003 | Unit | Bak Penyimpanan/Tower Air Baku | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 01 | 999 | | Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 02 | 000 | | BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU | |
| 5 | 02 | 06 | 02 | 001 | Unit | Bangunan Pengambilan Dari Waduk | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 02 | 002 | Unit | Bangunan Pengambilan Dari Sungai | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 02 | 003 | Unit | Bangunan Pengambilan Dari Danau | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 02 | 004 | Unit | Bangunan Pengambilan Dari Rawa | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 02 | 005 | Unit | Bangunan Pengambilan Dari Air Laut | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 02 | 006 | Unit | Bangunan Pengambilan Dari Sumber Air | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 02 | 007 | Unit | Bangunan Pengambilan Dari Sumur Artetis | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 02 | 999 | | Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 03 | 000 | | BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU | |
| 5 | 02 | 06 | 03 | 001 | Unit | Saluran Pembawa Air Baku Terbuka | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 03 | 002 | Unit | Saluran Pembawa Air Baku Tertutup | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 03 | 999 | | Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 04 | 000 | | BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU | |
| 5 | 02 | 06 | 04 | 001 | Unit | Saluran Pembuang Air Cucian Air Baku | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 04 | 002 | Unit | Saluran Pembuang Air Cucian Instalasi | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 04 | 999 | | Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 05 | 000 | | BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU | |
| 5 | 02 | 06 | 05 | 001 | Unit | Bangunan Talang (Bangunan Pelengkap Air Bersih/air Baku) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 05 | 002 | Unit | Bangunan Syphon (Bangunan Pelengkap Air Bersih/air Baku) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 05 | 003 | Unit | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Bersih/air Baku) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 05 | 004 | Unit | Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Air Bersih/air Baku) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 05 | 005 | Unit | Bangunan Penampung Air Baku | Bangunan Air Lainnya |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|------|---|----------------------|
| 5 | 02 | 06 | 05 | 006 | Unit | Bangunan Hidran Umum | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 05 | 007 | Unit | Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 05 | 008 | Unit | Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 05 | 009 | Unit | Bangunan <i>Buster Pump</i> | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 05 | 999 | | Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 06 | 99 | 000 | | BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA | |
| 5 | 02 | 06 | 99 | 999 | | Bangunan Air Bersih/air Baku Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 00 | 000 | | BANGUNAN AIR KOTOR | |
| 5 | 02 | 07 | 01 | 000 | | BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR | |
| 5 | 02 | 07 | 01 | 001 | Unit | Saluran Pengumpul Air Hujan | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 01 | 002 | Unit | Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 01 | 003 | Unit | Saluran Pengumpul Air Buangan Industri | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 01 | 004 | Unit | Saluran Pengumpul Air Buangan Pertanian | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 01 | 999 | | Bangunan Pembawa Air Kotor Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 02 | 000 | | BANGUNAN WADUK AIR KOTOR | |
| 5 | 02 | 07 | 02 | 001 | Unit | Waduk Air Hujan | Bendung |
| 5 | 02 | 07 | 02 | 002 | Unit | Waduk Air Buangan Domestik | Bendung |
| 5 | 02 | 07 | 02 | 003 | Unit | Waduk Air Buangan Industri | Bendung |
| 5 | 02 | 07 | 02 | 004 | Unit | Waduk Air Buangan Pertanian | Bendung |
| 5 | 02 | 07 | 02 | 999 | | Bangunan Waduk Air Kotor Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 03 | 000 | | BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR | |
| 5 | 02 | 07 | 03 | 001 | Unit | Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 03 | 002 | Unit | Saluran Pembuang Air Buangan Domestik | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 03 | 003 | Unit | Saluran Pembuang Air Buangan Air Industri | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 03 | 004 | Unit | Saluran Pembuang Air Buangan Air Pertanian | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 03 | 999 | | Bangunan Pembuang Air Kotor Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 04 | 000 | | BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR | |
| 5 | 02 | 07 | 04 | 001 | Unit | Bangunan Pompa Air Hujan | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 04 | 002 | Unit | Bangunan Pompa Air Buangan Domestik | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 04 | 003 | Unit | Bangunan Pompa Air Buangan Industri | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 04 | 004 | Unit | Bangunan Pompa Air Buangan | Bangunan |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|------|---|----------------------|
| | | | | | | Pertanian | Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 04 | 999 | | Bangunan Pengaman Air Kotor Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 05 | 000 | | BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR | |
| 5 | 02 | 07 | 05 | 001 | Unit | Bangunan Talang (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 05 | 002 | Unit | Bangunan Syphon (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 05 | 003 | Unit | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 05 | 004 | Unit | Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 05 | 005 | Unit | Bangunan Bak Kontrol/Man Hole | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 05 | 006 | Unit | Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 05 | 007 | Unit | Bangunan (Box) <i>Culvert</i> | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 05 | 008 | Unit | <i>Multiple Pipa Arches</i> | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 05 | 009 | Unit | Bangunan Plat Deker | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 05 | 999 | | Bangunan Pelengkap Air Kotor Lainnya | Bangunan Air Lainnya |
| 5 | 02 | 07 | 99 | 000 | | BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA | |
| 5 | 02 | 07 | 99 | 999 | | Bangunan Air Kotor Lainnya | Bangunan Air Lainnya |

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI